

**Representasi Kebijakan Australia Labor Party dalam Kuota Parlemen**

**Perempuan Australia Pada Masa Julia Gillard (2010-2019)**

**SKRIPSI**

ACC diuji dalam sidang pendadaran  
Yogyakarta, 1 Desember 2020



Hangga Fathana

Dosen Pembimbing : Hangga Fathana, S.IP., B.Int., M.A.



Oleh:

**Dian Fiskurniawati**

**17323079**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

**Representasi Kebijakan Australia Labor Party dalam Kuota Parlemen  
Perempuan Australia Pada Masa Julia Gillard (2010-2019)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Derajat Sarjana SI Hubungan Internasional

Dosen Pembimbing : Hangga Fathana, S.IP., B.Int., M.A.



Oleh:

**Dian Fiskurniawati**

**17323079**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	6
PENDAHULUAN .....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Signifikansi.....	9
1.5 Cakupan Penelitian.....	10
1.6 Tinjauan Pustaka .....	11
1.7 Landasan Teori/Konsep/Model.....	19
1.8 Metode Penelitian.....	22
1.8.1. Jenis Penelitian.....	22
1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian.....	22
1.8.3. Metode Pengumpulan Data.....	23
1.8.4. Proses Penelitian .....	23

BAB II.....	25
PERKEMBANGAN PERAN PEREMPUAN DI PARLEMEN MASA	
KEPEMIMPINAN JULIA GILLARD .....	25
2.1. Keterwakilan Peran Perempuan di Kursi Politik Australia Pada Masa Pemerintahan Julia Gillard .....	25
2.2. Orientasi Kebijakan Partai Buruh yang Akomodatif terhadap Isu Gender	30
2.3. Struktural Keterwakilan Perempuan di Australia.....	34
BAB III .....	38
ANALISIS STRUKTURAL KETERWAKILAN PEREMPUAN DI	
AUSTRALIA DALAM PERSPEKTIF FEMINISME POST STRUKTURALIS	
3.1. Analisis Pengaruh Kuota Perempuan Terhadap Hak Terpilih di Parlemen Australia .....	38
3.1.1. Identifikasi Kesetaraan Gender di Parlemen Terhadap Prinsip Maskulinitas .....	38
3.1.2. Analisis Pengaruh Peran Perempuan di dalam Parlemen Melalui Kebijakan Australia Labor Party .....	44
3.2. Implementasi Struktural Keterwakilan Perempuan di Australia Dalam Perspektif Feminisme Post Strukturalis .....	52
3.2.1. Analisis Pengaruh Glass Ceiling dalam Perspektif Feminisme Post Strukturalis .....	52

3.2.2. Analisis Dampak dari Kesetaraan Kuota Perempuan di Parlemen	
Australia .....	61
BAB IV .....	67
KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
4.1. Kesimpulan .....	67
4.2. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan gender yang berada di Negara Australia adalah suatu isu dalam konteks gender yang berperannya seorang laki - laki yang lebih mendominasi untuk bersuara di dunia politik pemerintahan. Dapat dilihat dari pemerintahan Australia mengenai peran perempuan. Australia cenderung mendukung adanya anggota pemerintah laki - laki yang bisa beraspirasi dan cenderung agresif. Sehingga banyak dari anggota pemerintahan kaum perempuan mulai mengungkapkan bahwa budaya perpolitikan seperti ini harus diubah. Para pemerintahan perempuan menganggap bahwa hal tersebut sangat menyinggung gender. Mereka menilai perlakuan tersebut terlalu mengintimidasi dan sangat membeda - bedakan perempuan. Politikus perempuan bahkan secara terang - terangan keluar dari Partai Liberal yang masih berlangsung kepemimpinan pada tahun 2018, karena beliau mengungkapkan perlawanan terhadap gender di dalam pemerintahan. Beberapa aktivis feminisme mulai bermunculan untuk mendiskusikan kasus kesetaraan gender dalam masyarakat khususnya dalam bidang politik pemerintahan. Banyak dari aktivis feminisme yang setuju bahwa peran seorang laki - laki dan perempuan harus setara dalam bidang apapun.

Kesetaraan gender ini, bertujuan untuk menyeimbangkan dan memberi kesempatan kepada perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik dan dapat menjadi perwakilan tanpa adanya peran laki - laki yang mendominasi.

Bahkan ada kejadian kudeta perpolitikan di Australia yang pada saat itu ada Perdana Menteri dari Partai Oposisi yaitu Malcolm Turnbull. Pada tahun 1902, peran perempuan sangat tidak terlihat di kursi pemerintahan, padahal perempuan tersebut termasuk dalam suku asli Australia (Mao, 2019). Namun peran perempuan dikenal dan mulai memasuki peran politik membutuhkan empat tahun sebelum perempuan pertama di Australia benar - benar menjadi anggota pemerintahan politik. Memang ada kuota perempuan dalam kursi pemerintahan namun dalam jabatan pemilihan yang menggunakan sistem proporsional. Dalam data pemilu di Australia saat ini, peran perempuan setidaknya ada 31 persen kursi pemerintah.

Pada awalnya, pemerintahan Australia tidak menerapkan kesetaraan gender di masing - masing wilayah negara. Ada suatu kejadian di mana salah satu pihak dari partai besar yang mendominasi yaitu Partai Buruh di Australia menerapkan sistem kuota perpolitikan pemerintah untuk perempuan karena dianggap bahwa Australia menyampingkan peran perempuan dalam perpolitikan pemerintah. Tujuan Partai Buruh tersebut menerapkan sistem kuota untuk menunjukkan kapasitas partai dan menegaskan fungsi partai politik yaitu sebagai pembuat argumentasi politik serta menjalankan kekuatan politik negara. Hal tersebut sangat berdampak cukup baik untuk membuat kebijakan kuota pemerintahan di Partai Buruh itu sendiri sehingga perempuan juga dapat berperan dalam politik dan dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan bahkan dalam bidang politik pemerintahan.

Implementasi dari Partai Buruh Australia sangat membawa dampak yang baik pada tahun 1903 dan mengeluarkan Undang - Undang Pemilihan Commonwealth yang berisi pengeluran hak bagi perempuan untuk tetap bisa

menjadi perwakilan di tempat pemerintah (Kusuma, 2015). Ketika dibentuk kebijakan tersebut, peran perempuan dalam kancah politik negara menjadi terlihat dan terlibat aktif dalam pemerintah. Dan ketika tahun 1994, Partai Buruh Australia memutuskan untuk menerapkan kebijakan afirmatif kuota perempuan dalam struktur politik berkisar 50 persen. Hal tersebut secara langsung memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk bisa berperan aktif dan mendapatkan posisi yang sebanding dengan kaum laki - laki. Terpilihnya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri ke - 27 juga menjadi dukungan terhadap peran kaum perempuan di dunia politik. Julia ini termasuk perdana menteri perempuan pertama di Australia yang bisa menjadi catatan penting untuk perempuan Australia dalam perwakilan peran di pemerintah (Adisty, 2018). Julia Gillard termasuk perwakilan perempuan dari Partai Buruh Australia. Hal tersebut menjadi point penting dalam penekanan kebijakan Partai Buruh dalam menanggapi persoalan kesetaraan gender.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana posisi perempuan di parlemen Australia menjadi sangat lemah karena standarisasi kebijakan maskulinitas terhadap kepemimpinan Julia Gillard?
2. Bagaimana dampak setelah diterapkannya kebijakan kuota perempuan yang lebih sensitif gender?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui posisi perempuan di kursi politik Australia menjadi sangat lemah karena standarisasi kebijakan maskulinitas terhadap kepemimpinan Julia Gillard.
2. Untuk mengetahui dampak setelah diterapkannya kebijakan kuota perempuan yang lebih sensitif gender.

### **1.4 Signifikansi**

Di Australia, pada tahun 1990-an dapat dilihat bahwa peran perempuan dalam kursi parlemen masih terbilang sangat kecil jika dibanding dengan peran laki-laki. Tidak terlibatnya peran perempuan dalam kursi parlemen seperti ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan merupakan sebuah bentuk yang mendiskriminasi baik langsung maupun tidak langsung. Isu gender semacam ini menjadi hal yang selalu didiskusikan dalam politik hubungan internasional dan dibahas melalui Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) dengan berbagai penyelesaian diskriminasi gender peran perempuan. Peran perempuan direncanakan agar mendapatkan posisi yang strategis dan juga seimbang dalam hal pembangunan, namun kenyataannya implementasinya kurang maksimal. Secara pemerintahan, banyak perempuan yang juga memiliki kemampuan untuk bersaing dan menduduki posisi penting di parlemen.

Namun struktur peran gender yang kaku, sangat berpotensi untuk menjauhkan perempuan dari peluang posisi jabatan tersebut. Seperti kutipan berikut “Nevertheless, to reach the top, it seems there are more obstacles for the women than for the men. Women, especially Asian Women have much to contend with. And in the pursuit of top positions they face a tougher resistance ‘The Glass Ceiling’ (Partini, 2012). Dapat diketahui bahwa memang peran dari perempuan sering kali ditemukan dalam organisasi, pemerintahan dan parlemen yang masih belum melihat peran perempuan pada jabatan penting. Selain itu, di Negara Australia peran perempuan cenderung sangat sedikit karena ada beberapa faktor, dan penulis ingin memaparkan lebih dalam menggunakan teori The Glass Ceiling dan kebijakan partai buruh yang berperan aktif dalam mengembangkan peran perempuan tersebut.

### **1.5 Cakupan Penelitian**

Isu Gender di perpolitikan Australia masih didominasi oleh peran laki - laki dalam kursi parlemen. Ketika tahun 1994, salah satu partai besar di Australia menciptakan kebijakan mengenai permasalahan peran perempuan yang kurang di pemerintahan. Partai buruh tersebut, membuat sebuah kebijakan kuota perempuan dalam kursi parlemen yang bertujuan untuk memberikan peran yang seimbang antara laki - laki dan perempuan sehingga perempuan juga memiliki tempat untuk berkontribusi aktif dalam pergerakan politik pemerintahan. Dan hasil pemilu tahun tahun selanjutnya seperti tahun 2010, 2016 mengalami peningkatan peran perempuan. Dapat dilihat awal mula pemilu tahun 1994 memiliki dampak - dampak

yang sangat baik untuk peran perempuan. Kebijakan tersebut berdampak baik terhadap peran perempuan hingga saat ini mencapai kisaran 30 persen peran perempuan ada di kursi parlemen dari total 50 persen populasi perempuan yang ada di Negara Australia.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Mengenai ketimpangan peran perempuan di Australia, buku dari Frank Crowley yang berjudul "*History of Australia : Colonial Australia*" (Crowley, 1980) memaparkan bahwa perempuan itu senantiasa hidup dalam lingkungan yang tertutup dan terlindungi di rumah. Terlindungi dari ketegangan dan tekanan persaingan industri, ambisi – ambisi professional dan godaan dari laki – laki lain. Dalam hal ini seorang perempuan dilatih untuk menuju status mereka yang nantinya akan menikah. Karena diharapkan peran mereka dapat menjadi ibu. Jika seorang anak perempuan dilahirkan dari keluarga yang mampu, baru peran perempuan boleh memiliki pendidikan yang tinggi, dan biasanya berhubungan dalam bidang seni. Namun jika seorang perempuan lahir dari keluarga yang pada dasarnya di kelas menengah, anak perempuan akan belajar yang lebih halus seperti menjahit, merajut, dan memasak.

Jika seorang perempuan lahir dari keluarga di kelas pekerja maka ia dikirim untuk menjadi pembantu rumah tangga, bekerja di pabrik – pabrik dan toko – toko kelontong. Pada kenyataannya, anak – anak perempuan yang bersekolah di Victoria, tidak mendapatkan apapun dari hasil pendidikan yang dipilih. Mereka hanya mendapatkan *skill* dalam hal bernyanyi dan menggambar. Dapat dilihat bahwa

peran perempuan tidak terlalu penting dalam sejarah di Australia sejak dulu. Perempuan selalu menjadi pilihan kedua atau bahkan tidak memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki- laki di Australia. Karena dari sekolah saja, peran perempuan hanya dilatih dan belajar dalam hal kesenian, apalagi dalam hal politik yang perempuan juga tidak mendapatkan pendidikan tersebut dan hanya orang kelas atas saja yang bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dapat dipahami bahwa pada masa kolonial, pekerjaan dan peran perempuan tidak dianggap penting. Berbagai macam bentuk pekerjaan seorang perempuan dianggap hanya untuk sementara karena anggapan untuk tujuan perempuan hanya menikah saja. Bagi perempuan, menikah merupakan puncak harapan dari sebuah kehidupan yang seumur hidup. Jadi ketika seorang perempuan menikah maka, itu akan berlangsung hingga mati dan tidak ada pekerjaan lain selain menikah. Sehingga hal itu terpola pada kaum perempuan di Australia bahwa bekerja hanya sementara dan lebih memfokuskan pada menikah. Tak banyak peran perempuan ada di lapangan pekerjaan atau bahkan dalam perpolitikan.

Sama halnya dalam jurnal Beverly Kingston yang berjudul "*My Wife, My Daughter and Poor Mary Ann*"(Kingston, 1975) mengklasifikasikan peran perempuan lebih ke dalam kelompok – kelompok sederhana jika dibanding dengan laki – laki. Tidak ada hal yang lebih istimewa di peran perempuan yang terpapar di jurnal ini yang hanya sekedar menikah dan menikah saja yang kenyataannya jika menikah maka akan mengalami masa kehamilan dan jika tidak menikah maka dianggap tidak baik. Dalam banyak hal tentang status perempuan dalam menikah, dijelaskan bahwa memiliki keinginan untuk berkarir bagi perempuan akan menjadi pekerjaan yang sesungguhnya sebagai seorang perempuan. Namun memang dalam

kenyataannya, rata – rata pernikahan yang ada di Australia ini menghasilkan sedikit anak yang sebanding dengan angka kelahiran yang ada di Negara Inggris dan Amerika Serikat.

Dan sejak tahun 1890 kurang lebih sekitar sepertiga jumlah perempuan di Australia sudah mulai bekerja di luar rumah. Perempuan di Australia pada dasarnya hanya berkedudukan di dalam rumah tangga dengan untuk menjadi istri dan ibu yang baik bagi keluarganya kelak. Memang ada sebagian peran perempuan yang bekerja, namun tetap akan didominasi oleh kaum laki – laki di dalamnya yang secara kenyataannya kesempatan untuk perempuan dalam bekerja tetap sedikit. Misalnya saja dalam bidang perpolitikan dan pemerintahan, peran perempuan di Australia baru mendapatkan hak bekerja dan hak pilihnya di tahun 1895 yang mana sebelum tahun itu, peran perempuan benar – benar tidak diwajibkan memilih dan tidak memiliki hak pilih. Akhirnya ada beberapa kelompok perempuan dari kalangan kelas menengah yang berpendidikan yang memprotes hal tersebut (Kingston, 1975).

Menurut Kingston sendiri, di awal tahun 1788 hingga akhir perang dunia I, ketika laki – laki menjelajah, menaklukkan, dan membangun negeri, banyak dari istri – istri di Australia menghadapi masalah berkurangnya pekerja perempuan sebagai pembantu rumah tangga (kelas pekerja berkurang). Sehingga mereka tidak dapat mengatur urusan rumah dengan baik tanpa adanya pekerja perempuan. Selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, perempuan dari kelas pekerja yang belum menikah juga menjadi pengasuh anak dan pembantu rumah tangga yang pada saat itu pekerjaan tersebut dinilai cukup baik dari kelas pekerja. Kewajiban dari seorang pembantu rumah tangga hanya seputar memasak, membersihkan rumah, mengasuh

anak, sebagai pelayan di rumah. Selain itu, pekerjaan lainnya adalah guru dan perawat, namun hanya perempuan dengan kelas menengah berpendidikan yang bisa memiliki pekerjaan seperti itu.

Hal ini didukung oleh tulisan Craign McGregor yang berjudul “*Profile of Australia*” (McGregor, 1966), masyarakat di Australia pada umumnya menolak bahwa adanya kelas di setiap penggolongan masyarakat seperti penggolongan sesuai kelas, atas, menengah dan pekerja. Namun dalam kenyataannya, tetap saja. Kaum perempuan yang memiliki golongan di kelas menengah akan lebih memiliki hak – hak istimewa yang sangat berbeda dibanding dengan kelas pekerja. Mereka banyak memiliki akses ke masyarakat dan lingkungan sehingga dapat membuatnya menjadi lebih aktif daripada kaum perempuan pekerja. Keterlibatan peran perempuan dalam lapangan pekerjaan mengalami perkembangan yang sangat lambat.

Seperti pada masa kolonial awal, jarang sekali perempuan bekerja di luar ruangan (lapangan yang jauh di sekitar tempat tinggalnya). Peran perempuan hanyalah sebagai istri, ibu dan pengurus rumah dengan baik. Mereka juga membiarkan para suami untuk mencari nafkah untuk keluarga, sehingga secara langsung membuat perempuan hanya bergantung pada upah seorang suami saja. Perempuan yang bekerja hanya karena alasan tertentu seperti ekonomi keluarga yang sangat terbatas dengan upah yang rendah, baru seorang perempuan nekat bekerja. Dalam hal ini, seiring berjalannya waktu, jumlah dari perempuan yang bekerja mengalami peningkatan karena didasarkan pada kebutuhan dan kesadaran akan perannya untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari perekonomiannya (Kingston, 1975).

Dalam tulisan pada buku yang berjudul “*Colonial Eve : Sources on Women in Australia*” yang ditulis Ruth Teale mengenai berbagai macam pilihan pekerjaan seorang perempuan, di mana hanya terfokus pada hal – hal yang tidak jauh dari peran ibu di rumah dan kurang populer di kalangan masyarakat. Ini juga dapat dipahami bagaimana diskriminasi pekerjaan pun masih terlihat jelas di perempuan Australia untuk dapat memilih pekerjaan yang diinginkan. Masyarakat Australia pada saat ini masih menganggap seorang perempuan selayaknya berada di rumah dan menjalankan perannya sebagai istri yang baik, dan jika seorang perempuan belum menikah, diharapkan hanya belajar di rumah untuk mempersiapkan diri menikah di waktu depan.

Sekitar tahun 1890 – awal 1990 kedudukan perempuan dan laki – laki masih sangat jelas, laki – laki mencari nafkah dan perempuan hanya berada di rumah mengatur segala urusan di rumah. Selain itu, (Government, 2015) di negara bagian Australia tepatnya di Victoria, banyaknya pabrik yang berkembang dan merupakan revolusi industri dan penemuan mesin – mesin yang mempermudah pekerjaan manusia. Pada tahun 1851, banyak juga memproduksi barang – barang industri dalam jumlah yang banyak, menyebabkan adanya peningkatan lapangan pekerjaan perempuan dari tahun 1911 hingga 1921 khususnya pada *low professional* seperti bidang administrasi, operator, buruh, dan asisten toko, sejak Perang Dunia I.

Di dalam artikel Australia Bureau of Statistcs yang berjudul “*Education Then and Now*” (Statistcs), mengenai pendidikan di Australia mengalami perubahan sejak masa federasi di tahun 1990 di mana Australia memiliki sekitar 6.900 sekolah untuk mengajar lebih dari 3.8 juta masyarakat pada saat itu. Pada tahun 1910 statistik Commonwealth mengatakan bahwa anak laki – laki dan

perempuan rata – rata meninggalkan bangku sekolah sekitar umur 14 tahun dengan beberapa alasan yang salah satunya tidak antusias ke sekolah dan juga permasalahan ekonomi keluarga. Mengajar merupakan cara pelarian yang paling mudah bagi para perempuan untuk tetap dapat bekerja di luar rumah. Jika dilihat pada saat itu, jumlah guru perempuan lebih sedikit dibanding dengan guru laki – laki, hal ini dikarenakan laki – laki memiliki kesempatan untuk berpendidikan lebih banyak. Perempuan Australia pada masa itu memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendidikan. Untuk menjadi guru saja, perempuan Australia harus lulus perguruan tinggi dengan baik. Diskriminasi terhadap perempuan dalam penempatan ruang kelas terlihat jelas pada laki – laki. Beberapa sekolah menempatkan laki – laki yang memiliki kesempatan untuk mengajar lebih dari satu kelas. Sedangkan pengajar perempuan hanya diberi tugas untuk mengajar hal – hal yang sepele seperti menari, memasak, dan lain – lainnya. Dapat dilihat betapa terlihatnya diskriminasi peran antara perempuan dan laki – laki dalam hal pekerjaan.

Dalam tulisan Rae Frances yang berjudul “*Women’s Mobilization for War (Australia)*”, di mana peran perempuan juga penting di peristiwa perang. Perempuan kala itu diberi pekerjaan sebagai perawat, dokter dan sukarelawan di zona pertempuran yang hampir sekitar 3.000 perempuan di Australia. Perempuan juga memiliki peran dan kepentingan ketika perang, sama halnya laki – laki. Hal ini dijunjung dengan rasa patriotisme dan kebanggaan untuk negaranya. Bahkan tak sedikit juga dari perempuan Australia ingin ikut berperang untuk perjalanan, petualangan dan pengalaman bekerja. Sebagian dari perempuan juga bertugas di Layanan Perawatan Angkatan Darat dan beberapa yang lain juga memilih



keperawatan di Palang Merah. Pasalnya, ketika perang dunia I dimulai, banyak kaum perempuan yang tidak diizinkan ikut berperang, kecuali jika perempuan tersebut berperan aktif dalam perawatan tentara – tentara militer yang terluka.

Banyak diantara literatur yang mengakui bahwa peran perempuan dalam peperangan adalah hanya untuk merawat orang yang terluka, tidak ada yang benar – benar mengakui bahwa perempuan memiliki pekerjaan yang menegangkan dan sulit misalnya ikut berperang. Karena ketika perempuan ikut berperang, akan ada banyak konsekuensi yang akan dihadapi seorang perempuan tersebut, seperti, harus juga mengurus anak – anaknya yang juga merupakan tanggung jawab seorang ibu. Pada tahun 1942, peran perempuan di rumah menjadi sedikit lebih banyak, karena banyak dari laki – laki yang ikut berperang, sehingga kaum perempuan harus bisa juga bertanggung jawab atas pekerjaan – pekerjaan laki – laki sebagai mencari nafkah keluarga untuk kelangsungan hidup keluarganya (Women in Wartime, 2009).

Dalam jurnal Angelika Heurich yang berjudul “*Women in Australian Politics: Maintaining the Rage against the Political Machine*” mengatakan bahwa perempuan dalam politik federal saat ini kurang terwakili dan selalu demikian. Selama ini, tidak ada dalam sejarah parlemen federal Australia, peran perempuan mencapai keterwakilan yang setara dengan laki – laki. Peran perempuan yang jarang sekali memegang posisi eksekutif yang adil di Partai Buruh Australia atau Partai Liberal. Pernah ketika perdana menteri perempuan pertama Julia Gillard, namun itu jarang sekali. Sebuah laporan pada tahun 2019 ini oleh Plan International menemukan bahwa seorang perempuan sangat sedikit semangatnya untuk mengejar karir di bidang politik, mengatakan bahwa mereka diberlakukan tidak adil

dalam jabatannya. Dijelaskan juga bahwa banyak dari perempuan yang membela haknya untuk memiliki kesempatan yang sama dan ketika awal tahun 1990, perempuan berkampanye untuk mendapatkan hak pilih. Kontribusi awal dari perempuan untuk masyarakat Australia merupakan tantangan tersendiri. Adanya organisasi – organisasi feminis di awal abad ke 20 seperti The Peace Peace Army, United Association of Women, Federasi Masyarakat Perempuan di Australia untuk Persamaan Kewarganegaraan, Persatuan Wanita Australia, Dewan Wanita Nasional, dan Federasi Pemilih Wanita Australia membuktikan adanya gerakan – gerakan perempuan penentang diskriminasi gender di Australia tahun 1970-an (Heurich, 2019).

Ketika melihat tahun 1972 dan 2016, perempuan kurang terwakili di parlemen yang tidak lebih dari 30 persen keterwakilan perempuan. Setelah pemilihan 1974 banyaknya perempuan tidak lebih dari satu persen. Tidak ada perempuan yang perwakilan di parlemen dari tahun 1975 atau 1977. Setelah pemilihan federal pada tahun 2016, peran perempuan mengalami peningkatan, meskipun hanya 32 persen adalah perempuan. Dan setelah pemilihan Juli 2016, hanya ada delapan wanita diangkat di Kementerian Turnbull Parlemen Australia. Konferensi Dunia Keempat PBB pada tahun 1995, menetapkan peran perempuan di target 30 persen untuk peran dalam pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir adanya diskriminasi peran perempuan dan laki – laki dalam hal jabatan politik khususnya di Australia.

Melihat dari penelitian – penelitian yang sudah ada, penulis ingin mencoba membahas terkait peran dari perempuan di Australia dalam hal mendapatkan hak bekerja khususnya di kursi parlemen pemerintahan dari tahun 1990-2019 dan

penelitian ini belum ada yang membahas sebelumnya. Karena peran perempuan di Australia masih didominasi oleh kaum laki – laki dalam berbagai bidang.

## 1.7 Landasan Teori/Konsep/Model

### Konsep Glass Ceiling

Konsep Glass Ceiling dalam tugas akhir ini menggunakan variabel Feminisme Post Strukturalisme yang dikemukakan oleh Sandra Harding. Realisasi dari keterwakilan kaum perempuan di kursi parlemen di sebagian besar negara menganggap bahwa hal tersebut adalah masih dinilai kurang efektif dan efisien. Banyak yang beranggapan bahwa peran dari seorang perempuan sangat kental dengan budaya tradisional, dimana stereotip peran perempuan yang dinilai tidak cukup baik dalam melakukan pekerjaan yang setara dengan laki-laki. Dapat dilihat dari keterwakilan perempuan di parlemen Australia masih sangat kental dengan kebijakan yang lebih terfokus pada maskulinitas dan perkembangan peran perempuan yang sangat lambat untuk bisa berpartisipasi dalam dunia perpolitikan.

Dalam buku karya Linda Wirth yang berjudul *Breaking to The Glass Ceiling*. Wirth menyatakan bahwa Glass Ceiling merupakan istilah yang diciptakan pada tahun 1970-an di Amerika Serikat untuk menggambarkan sebuah hambatan yang tak terlihat dengan prasangka sikap individu maupun kelompok mengenai posisi dan peran wanita yang diskriminatif terhadap kaum laki – laki. Hal ini terjadi karena adanya cerminan sosial dan ketimpangan gender di dalam masyarakat. Glass Ceiling ini adalah sebuah tantangan tersendiri dari peran kaum perempuan karena adanya faktor stereotip perihal gender yang mempengaruhi adanya perbedaan

perempuan dan laki – laki dalam hal jabatan, karier, dan peran dominan dalam masyarakat (Wirth, 2001). Banyak dari peristiwa Glass Ceiling yang mendiskriminasi peran perempuan. Menurut Weyer sendiri ada tiga kategori dalam Glass Ceiling (Weyer, 2007) adalah

1. Adanya anggapan bahwa laki – laki lebih mampu dalam pekerjaan. Seperti di sebuah perusahaan di mana lebih cenderung memilih karyawan laki – laki ketimbang perempuan karena dianggap memiliki kemampuan yang lebih jika dibanding dengan perempuan. Perempuan benar – benar didiskriminasi dalam hal pekerjaan dan tidak diberi kesempatan untuk membuktikan diri.
2. Adanya anggapan kuno mengenai budaya yang lebih mengesampingkan peran perempuan yaitu stereotip dan gaya kepemimpinan. Pemimpin perempuan banyak dianggap kurang memiliki karakteristik untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses (Kleiner, 1999).
3. Budaya dan strukturnya jelas memfokuskan dalam feminist theory.

Dalam kategori tersebut, masih banyak terjadi pekerja perempuan yang dianggap belum berkompeten bersaing dengan laki – laki dalam hal pekerjaan dan jabatan serta kurang layak nya pendidikan dan pengalaman kerja perempuan. Selain itu, adanya anggapan bahwa laki – laki memiliki ambisi untuk mendapatkan sesuatu yang tinggi. Akibat dari adanya stereotip di masyarakat mengenai peran perempuan dan laki – laki, banyak penerimaan pekerjaan yang tidak adil, di mana lebih mempercayai laki – laki sebagai seorang yang pantas menduduki posisi pemimpin karena seorang perempuan jika bekerja banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam hal keluarga. Glass Ceiling dalam hal ini, adalah

istilah yang menggambarkan adanya peran perempuan untuk mencapai jabatan tinggi di perusahaan maupun pekerjaan lainnya sangat dibatasi, jika ada, itu pun hanya sebagian kecil dari perempuan yang bisa menduduki jabatan tinggi.

Pada penulisan proposal ini, penulis akan menganalisis penelitian menggunakan konsep Glass Ceiling dalam membatasi makna dari Glass Ceiling yang akan banyak disebutkan dalam penelitian dan bentuk – bentuk dari Glass Ceiling dalam menganalisa suatu permasalahan gender di Negara Australia yang dilakukan oleh partai yang mendominasi khususnya dalam bidang parlementer di mana peran perempuan masih belum sama – sama mendominasi dibanding dengan peran laki – laki di perpolitikan di Australia. Konsep dari Glass Ceiling memandang bahwa kesempatan yang dimiliki perempuan untuk menjabat di sebuah jabatan yang tinggi cukup dibatasi, bahkan hanya sebagian dari perempuan yang berpendidikanlah yang pantas menjabat di jabatan yang tinggi, dan itu pun tidak semua perempuan. Hal ini dapat dinilai sebagai upaya untuk mendiskriminasi posisi perempuan dalam permasalahan jabatan sebagai kelompok minoritas. Dan dapat dilihat pada tahun 1994 di Australia, suara perempuan mulai didengar dan berdampak pada penerapan kebijakan afirmatif kuota perempuan dalam struktur politik pemerintah yang naik hingga kisaran 50 persen. Hal tersebut sangat berdampak baik bagi peran perempuan untuk juga berperan aktif di perpolitikan. Dan pada tahun 2010, Julia Gillard resmi dilantik menjadi Perdana Menteri perempuan pertama di Australia (News, 2010). Hal ini dapat dipahami bahwa peran perempuan di Australia sangat meningkat dan berkembang, sehingga perempuan juga dapat memiliki peran yang sama dengan laki – laki di kursi pemerintahan Australia.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif guna memahami dan menafsirkan dalam bidang sosial seperti sebuah peristiwa gender dan perilaku yang sedang terjadi. Penelitian kualitatif menggunakan kerangka konseptual untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dari topik penelitian yang akan dianalisis (Agung Kurniawan, 2016). Beberapa data yang diambil sebagai sumber berupa jurnal, buku, berita, di media social. Dalam menelusuri dan mempelajari dari beberapa literatur dokumen, jurnal, buku dan berita yang memiliki kaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti ini, penulis akan menggunakan teknik penelitian pustaka

### **1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah menganalisis sebuah kejadian di mana peran perempuan di Australia sangat kurang berperan aktif jika dibanding dengan laki – laki dalam hal menempati kursi parlemen di perpolitikan negara. Kejadian tersebut terlihat dari peran laki – laki yang mendominasi untuk bersuara di dunia politik pemerintahan. Pemerintah Australia cenderung mendukung adanya anggota pemerintah yang laki – laki. Sehingga banyak dari politikus perempuan yang mengeluarkan aspirasi dan secara langsung keluar dari Partai Liberal yang masih berlangsung kepemimpinan pada tahun 2018, dan politikus tersebut mengungkapkan perlawanannya terhadap diskriminasi gender di dalam pemerintahan. Kejadian tersebut akan sangat membantu penulis dalam mengetahui dan memahami bagaimana proses diskriminasi gender terjadi di Australia, serta

dapat melihat dari kejadian masa lalu di mana terjadi kudeta perpolitikan di Australia yang pada saat itu ada Perdana Menteri dari Partai Oposisi yaitu Malcolm Turnbull yang melihat bahwa peran perempuan sangat tidak terlihat di kursi parlemen pada tahun 1902.

### **1.8.3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Data sekunder yang diambil diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan (Santoso Singgih, 2001). Data – data yang diambil bersumber dari literatur buku, dokumen dari internet seperti jurnal, berita, dan sumber laporan lainnya. Data ini juga berupa dokumenter peristiwa terdahulu seperti sejarah dan informasi dokumentasi lainnya yang dapat diambil melalui internet (online).

### **1.8.4. Proses Penelitian**

Proses dari pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan sebagai pedoman untuk menganalisis rumusan masalah dari topik penelitian yang akan dibahas, dengan beberapa tahap, diantaranya adalah

1. Memahami rumusan masalah dari penelitian yang akan dianalisis, maka penulis berupaya untuk mencari berita – berita dari sumber – sumber terpercaya untuk dapat memahami suatu permasalahan
2. Membuat kerangka pertanyaan dari pendapat – pendapat penulis sesuai dengan topik permasalahan sehingga dapat memaparkan penelitian untuk sebuah tujuan yang ingin dicapai

3. Mencari teori, model atau konsep yang sesuai dengan topik permasalahan di penelitian ini, sehingga ketika mengetahui topik, konsep, atau model yang akan digunakan, penulis dapat lebih mudah untuk menganalisis rumusan masalah yang ditentukan untuk sub bab pembahasan
4. Mencari literatur dan mengumpulkan tinjauan pustaka untuk memastikan bahwa penelitian yang akan diteliti benar adanya, sesuai dengan realita
5. Menganalisis penelitian dari data – data dari sumber untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah





## **BAB II**

### **PERKEMBANGAN PERAN PEREMPUAN DI PARLEMEN MASA KEPEMIMPINAN JULIA GILLARD**

#### **2.1. Keterwakilan Peran Perempuan di Kursi Politik Australia Pada Masa Pemerintahan Julia Gillard**

Julia Gillard dilantik menjadi perdana menteri pada tanggal 24 Juni 2010 di mana pada saat itu, Gillard berhasil merebut kekuasaan Kevin Rudd dengan persentase jumlah suara adalah 57 dan 45. Banyak dari kalangan politikus Negara Australia yang tertarik dalam pemilihan ini. Gillard menjadi Perdana Menteri Perempuan pertama di sejarah Australia dan fakta yang banyak menjadi kritikan adalah Gillard seorang perempuan. Beberapa pihak yang mengkritik Gillard sebagai perdana menteri adalah karena Gillard seorang perempuan yang belum menikah, tidak memiliki anak, dan banyak simpang siur terkait julukan negatif yang diberikan kepada Gillard. Dapat terlihat bahwa dampak dari kesenjangan gender terlihat pada masa kepemimpinannya (Joakim Eidenfalk, 2018).

Kritik yang ditujukan kepada Gillard memicu banyaknya diskusi di media terkait dengan relevansi situasi dari seorang perempuan untuk berkeluarga dengan kemampuan mereka untuk mendapatkan jabatan politik secara efektif. Dalam kutipan Henderson, mengatakan bahwa ketika seorang perempuan menjadi politisi, maka akan digambarkan secara detail bahkan ketika dia berpenampilan, dan media akan berkonsentrasi pada segala aspek yang berkaitan dengan moral tradisional peran dari seorang perempuan itu sendiri. Seperti bagaimana seorang perempuan

yang juga seharusnya mendapati dirinya menjadi seorang ibu untuk keluarganya. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi fokus perempuan sebagai aktivis politik (Henderson, 1999).

Lain halnya seorang politisi laki-laki, di mana ketika seorang laki-laki masuk pada pekerjaan politik pemerintah, maka akan disimpulkan bahwa laki-laki tersebut adalah bekerja, tanpa menghubungkan tentang tanggung jawab mereka dalam keluarga atau bahkan ketika mereka memiliki anak. Di Australia, perkembangan terkait gender masih menjadi suatu objek untuk menggunakan stereotip gender perempuan sebagai sarana untuk menyerang politisi perempuan. Bahkan ketika tahun 2005, Julia Gillard mulai mencalonkan diri sebagai pemimpin dari Partai Buruh Australia dan mendapat banyak kritikan di media “The Australian people will not cop a left-wing sheila” (Stewart, 2005) yang dikutip dari salah satu media Australia saat itu.

Keterwakilan dari peran perempuan di kursi parlemen pemerintahan dengan memberikan hak perempuan untuk memilih, banyak beranggapan bahwa hal tersebut sebagai ancaman terhadap tatanan sosial tradisional. Ada ketakutan atau kekhawatiran bahwa ketika seorang perempuan lebih aktif dalam perpolitikan atau pekerjaan apapun, hal tersebut dapat meninggalkan peran inti dari seorang perempuan itu sendiri dalam mengurus rumah, pasangan hidup, dan anak (Simms, 1993). Namun di sisi lain, kesetaraan gender dan kuota perempuan dalam pemerintahan bukan sebagai alasan untuk mengganti peran dari keibuan seorang perempuan, melainkan termasuk hak pilih yang umum yang dianggap memang sudah menjadi hak seorang perempuan untuk bisa merasakan dan mendapatkan kesetaraan yang sama di mata hukum. Misalnya saja seperti yang ada di Australia

bagian Barat, pada tahun 1899 hanya terdapat 20.000 perempuan dalam usia memilih dan sebanyak 70.000 laki-laki yang mendapatkan lebih banyak hak untuk memilih kehidupannya. (Simms, 1993).

Pada pemilihan umum ketika Julia Gillard memutuskan untuk ikut andil dalam peran perempuan di kursi perdana menteri untuk pertama kalinya, banyak hal yang diperdebatkan terkait dengan gender dan pandangan seorang perempuan yang menjabat di kepemimpinan negara. Pemilihan perdana menteri di tahun 2010 menjadi pemilihan yang pertama dalam sejarah perpolitikan Australia karena calon dari perdana menteri seorang perempuan berkampanye dalam pemilihan pemerintahan. Meskipun menghindari fokus kebijakan apa pun dalam isu-isu gender, gender tetaplah berada di bawah dalam pemilihan umum. Seperti halnya tercermin dalam kesenjangan gender yang nantinya akan berpengaruh pada pandangan publik dan eksistensi memilih untuk suara perempuan.

Dalam pemilihan kepemimpinan tahun 2010 di Australia antara Julia Gillard dan Tony Abbott yang mana dia adalah seorang pemimpin oposisi yang banyak mengedepankan kebijakan-kebijakan yang maskulin dan mengesampingkan isu kesetaraan gender. Banyak dari kampanye yang disampaikan Abbott dan tujuan dari kepemimpinannya terkait dengan mengurus peran seorang perempuan yang sebaiknya tidak mengambil pekerjaan di kedudukan perpolitikan. Dan dalam pemilihan umum ini, kesenjangan gender terlihat dari hasil suara yang sebagian besar kaum perempuan memilih kepemimpinan Gillard dan sebagian besar kaum laki-laki memilih kepemimpinan Abbott.

**Table I.1 Gender Gap on “Who Would Make the Better Prime Minister?”**

	Date	Male (1%)	Female (1%)
Julia Gillard	23-25 July and 30 July - 1 August 2010	49	52
	30 July - 1 August and 6-8 August 2010	47	52
Tony Abbott	23-25 July and 30 July - 1 August 2010	38	31
	30 July - 1 August and 6-8 August 2010	39	30

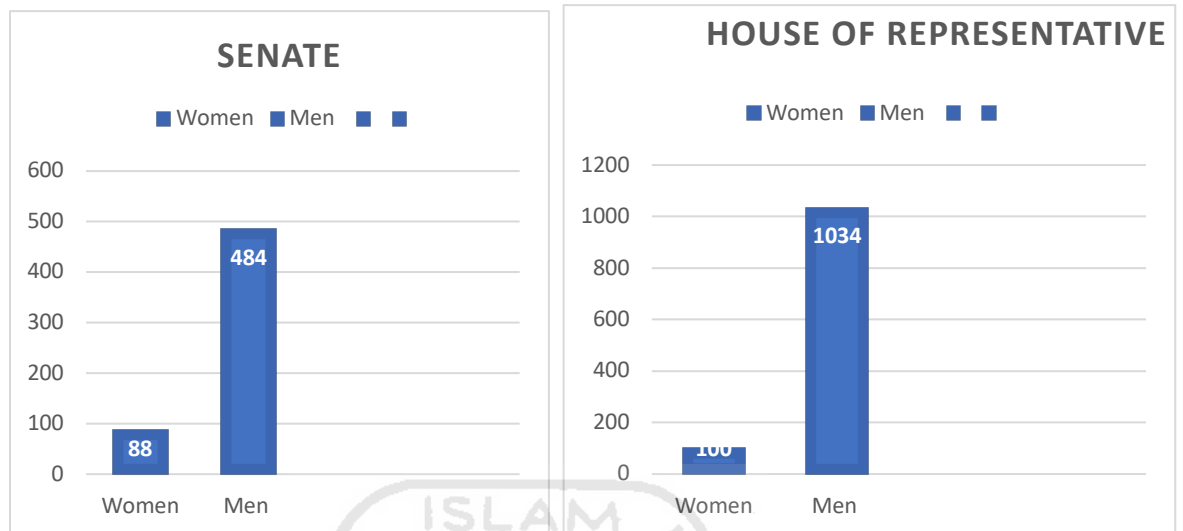
Sumber: Newspoll and The Australian

Dari tabel tersebut tertera Hasil dari suara masyarakat Australia sesuai gender dan mendapati suara perempuan unggul di kampanye Julia Gillard. Ketika seorang perempuan memahami dirinya dalam kursi parlemen perlu untuk kesetaraan posisi, akan ada banyak perspektif seperti ketika dia menggunakan gaya yang feminim dalam kepemimpinannya maka akan ada pandangan bahwa kepemimpinannya tidak cukup tangguh. Sebaliknya, ketika kaum perempuan menggunakan gaya kepemimpinannya yang maskulin maka juga akan ada pandangan bahwa perempuan tersebut terlalu ambisius dalam suatu pekerjaan sehingga dapat dipahami bahwa perempuan tersebut menurunkan derajat esensi dari seorang perempuan. Kampanye yang dilakukan Gillard berusaha untuk menjangkau kaum laki-laki dan kaum perempuan, terkhusus adalah perempuan untuk membuktikan bahwa hak memilih kaum perempuan tidak dibatasi oleh peran dominasi dari kaum laki-laki.

Peran perempuan dengan keterwakilan cukup baik terlihat pada saat ketika Julia Gillard menjadi Perdana Menteri pertama Australia yang berasal dari *Australian Labor Party* (ALP) di tahun 2010 hingga 2013. Keterwakilan perempuan ini sedikit ada peningkatan setelah Gillard terjun ke kursi pemerintahan untuk menyuarakan suara perempuan. Kemudian ditahun 2011, Lara Giddings yaitu Perdana Menteri Tasmania wanita pertama juga berhasil menduduki kursi kepemimpinan hingga tahun 2014. Dan ada Katy Gallagher sebagai ketua Menteri Perempuan ketiga di kursi legislatif *Australian Capital Territory* (ACT) (McCann, 2014). Setiap negara bagian dan teritorial yang ada di Australia Selatan memiliki setidaknya satu keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen dari perdana menteri atau menteri utama suatu kawasan. Seperti halnya, ada delapan keterwakilan perempuan yang memimpin pemerintahan di negara bagian ALP dan satu orang perempuan memimpin di ACT liberal pemerintahan.yaitu Kate Carnell di tahun 1995 hingga 2000. Representasi peran perempuan hanya kisaran 11 persen dari total anggota dan mendominasi kaum laki-laki yang menjabat.

## Grafik I.1 : Jumlah Kuota dalam Senat dan House of Representative Gender

1 July 2014



Sumber: Compiled by Parliamentary Library from *Parliamentary Handbook*

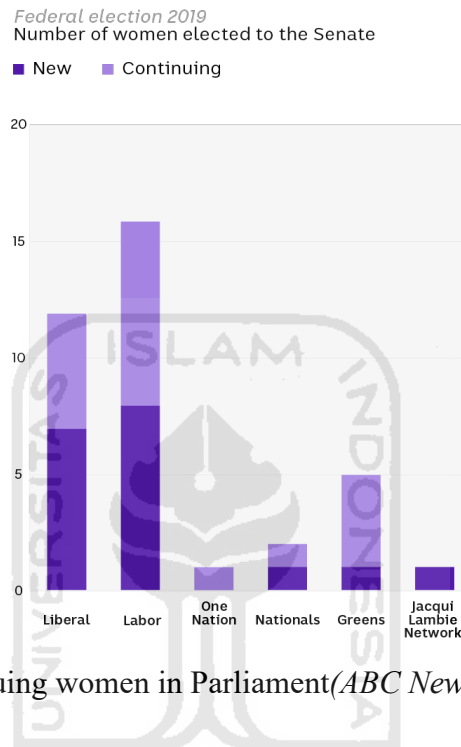
### 2.2. Orientasi Kebijakan Partai Buruh yang Akomodatif terhadap Isu

#### Gender

Penghapusan aturan yang diterapkan di Australia pada tahun 1902 di mana melarang perempuan untuk memberikan suara dan mencalonkan diri di parlemen adalah langkah awal untuk menerapkan keterwakilan perempuan. Namun, dalam kenyataannya faktor budaya yang menyebabkan sulitnya realisasi dan representasi untuk keterwakilan perempuan di mana budaya dominasi patriarki yang tertanam di masyarakat sangat sulit untuk diubah. Awal mula terpilihnya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri Australia karena ada beberapa pendapat yang muncul dalam Partai Buruh (*Australian Labor Party*). Ketika Kevin Rudd masih menjabat sebagai perdana menteri, banyak hal yang menyimpang dan dinilai gagal dalam

melancarkan tujuan terkait rencana perdagangan emisi dan pajak pertambangan sehingga digulingkannya Rudd sebagai perdana menteri dan digantikan oleh Julia Gillard.

**Grafik 1.2 Jumlah Perempuan dalam Elektoral Federasi Tahun 2019**



Sumber : New and continuing women in Parliament(ABC News)

Dalam posisi Gillard yang sebelumnya adalah sebagai Wakil Perdana Menteri yang mengangkat isu ketenaga kerjaan, sosial, dan pendidikan. Dalam kehadiran perempuan di pemilihan umum membawa sedikit perubahan kuota perempuan dalam pemerintahan yang pada dasarnya sangat dibatasi. Dapat diketahui bersama, dari data Federal Election tahun 2019 di Australia, keterwakilan perempuan di parlemen sebagian besar berada di Partai Buruh Australia dengan persentase 47 persen untuk kuota perempuan dan 53 persen untuk kuota laki-laki. Sedangkan dalam Partai Liberal di Australia hanya mencapai 23 persen keterwakilan perempuan dan 77 persen dari kaum laki-laki (Norman, 2019). Dari keterwakilan tersebut, dapat menjadi titik terang dalam pemilihan umum yang tidak

banyak jumlah perempuan di Parlemen Federal. Dan dapat dibuktikan bahwa sebagian partai yang ada di Australia, Partai Buruh mendapati posisi atas dalam membantu keterwakilan di parlemen.

**Tabel 1.2 : Dominasi Model Kesetaraan Gender dalam Perpolitikan**

Ukuran	Dominasi Laki-Laki	Kesetaraan Gender
1. Representasi	Keterwakilan perempuan kurang	40-60 persen representasi kesetaraan gender
2. Politik Sebagai Tempat Kerja	Kuatnya pandangan maskulinitas	Bias gender dan pandangan terhadap keluarga
3. Pemisahan Gender Secara Vertikal	Pembagian gender yang tidak setara dalam sistem perpolitikan	Posisi kepemimpinan berkisar 40-60 persen
4. Pemisahan Gender Secara Horizontal	Akses kaum perempuan dibatasi dalam hal kuota dan system	Peraturan diterapkan tanpa bias gender terkait keahlian dan minat
5. Diskursus dan Budaya	Persepsi gender terkait politisi	Wacana yang mendominasi terkait kesetaraan gender dan demokrasi
6. Kebijakan Publik	Kebijakan cenderung berpihak pada laki-laki dan tidak peduli terkait kesetaraan gender	Promosi kesetaraan gender agar memastikan suatu kebijakan untuk mengutamakan proporsi dari laki-laki dan perempuan.

Sumber : Adapted from Dahlerup and Leyenaar



Dapat terlihat dalam penelitian Dahlerup atau Leyenaar, parlemen representasi dari peran perempuan mendapati empat tahap kemajuan menuju kesetaraan gender dengan Australia berada ketiga dari empat tahap menuju kesetaraan gender. Meskipun terjadi peningkatan jumlah perempuan yang mencapai posisi kepemimpinan seperti kepala pemerintah atau ketua parlemen, keterwakilan politik perempuan di Australia terhenti sejak 2005 di mana hal tersebut dianggap sebagai memecah belah sehingga partai-partai besar ketika itu mengalami kesulitan untuk bisa mengimplementasikan kesetaraan gender dalam hal nasional. Seperti ketika kampanye pemilihan umum Abbott dan Rudd dimana mereka menunjukkan pemikiran bahwa kepemimpinan membutuhkan gaya dan realisasi yang maskulinitas tradisional. Pemilu tahun 2013 terlihat banyak dari aktor politik yang protes terhadap kebijakan yang tidak mementingkan gender.

Kebijakan Partai Buruh Australia dalam mendukung keterwakilan perempuan yaitu dengan mengesahkan kebijakan kuota pada tahun 1996 di Konferensi ALP Nasional. Partai Buruh mendukung perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam semua jabatan atau tingkatan struktural partai, pemerintahan, dan pekerjaan publik lainnya. Tujuan dari kebijakan partai buruh adalah terkait dengan mempromosikan dan mendukung partisipasi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan, mempertahankan peran aktif dalam forum internasional untuk mempromosikan hak-hak perempuan berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan penghapusan Discrimination Against Women. Dalam hal ini, partai buruh juga memastikan terkait realisasi undang-undang diskriminasi seks dan kewenangan komisioner untuk melindungi

perempuan sesuai hak yang dimiliki sehingga dapat mendukung perempuan untuk perwakilan dan berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan (Wright, 2018).

### **2.3. Struktural Keterwakilan Perempuan di Australia**

Keterwakilan peran perempuan di mata internasional adalah sekitar seperlima perempuan di dunia internasional adalah perempuan. Dari data Inter-Parliamentary Union's (IPU) terkait keterwakilan perempuan Australia di anggota parlemen ada sekitar 188 negara dengan persentase perempuan berjumlah 21.9 persen dari tingkat nasional (Meeting, 2005). Dan saat ini sedikit mengalami peningkatan dengan jumlah persentase keterwakilan perempuan di parlemen sebanyak 30.46 persen. Menurut klasifikasi data dunia perhitungan Women in National Parliament, pada tahun 2001, Australia mendapati keterwakilan perempuan di peringkat 20 internasional. Di tahun 2008, Australia berada di peringkat ke-50 di dunia. Di tahun 2014 keterwakilan perempuan di senat Australia mendapati peringkat 44 dengan persentase perempuan sebanyak 26 persen (Union, 2013). Sedangkan di tahun 2020 ini, Australia mendapati peringkat ke 49 dari 193 negara di mana keterwakilan perempuan berkisar 39.5 persen dalam jabatan sebagai senat yang memberikan hak kursi pemerintahan berkisar 76 dan perempuan yang menduduki kursi tersebut adalah 30 perempuan (Parliaments, 2019).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan di senat Australia mendapati peningkatan nilai dari peran perempuan politik namun mengalami kemunduran dari peringkat internasional menurut data IPU. Sehingga, perkembangan keterwakilan perempuan di Australia masih sangat lambat jika

dibanding dengan negara-negara lain yang juga memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan kursi di parlemen. Di tahun 2011, para pemimpin politik perempuan menghadiri Sidang Umum PBB di New York yang ke-66 dan mendiskusikan bahwa dari data keterwakilan perempuan hanya berkisar kurang dari 10 persen dari pemimpin dunia dengan anggota parlemen. Namun, tetap secara kuota, penambahan kursi partisipasi politik perempuan cukup efektif.

Para pemimpin politik tersebut bahkan menandatangani pernyataan bersama terkait dengan penyeruan kesetaraan hak perempuan untuk berpartisipasi di semua bidang dan semua tingkatan dalam perpolitikan dan menegaskan kembali dukungan dan peran penting dari PBB untuk mencapai kesetaraan dan pemberdayaan gender perempuan internasional. Dalam hal perwakilan kaum perempuan, PBB telah mengidentifikasi sejumlah hambatan yang sering ditemukan ketika seorang perempuan dipilih untuk menjadi anggota parlemen nasional secara global. Hambatan – hambatan yang sering terjadi umumnya dapat mempengaruhi representasi kursi politik untuk perempuan dan juga terkait dengan kuota perempuan agar bisa mengimplementasikan keterwakilannya (Simms M. S., 2012).

Perempuan telah banyak memberikan kontribusi terkait dengan pandangan publik tentang peran dari kaum perempuan dalam dunia perpolitikan. Meskipun selama bertahun-tahun sejumlah perempuan yang aktif dibidang yang terkait tradisional seperti perawatan kesehatan, pendidikan, seni, dan keluarga serta terkait dengan sosial masyarakat. Dan saat ini, kebijakan publik yang mengatur tentang perempuan di mana senator perempuan juga dilibatkan. Pada tahun 1946, amandemen bagian 51 Konstitusi Australia memberikan hak untuk membuat suatu

undang-undang terkait dengan keluarga dan urusan rumah tangga. Dalam lima puluh tahun terakhir di Australia, isu-isu semacam ini menjadi semakin terlihat memiliki status dan pengkhususan di mata politik. Seperti ketika Annabelle Rankin menjadi seorang perempuan pertama di tahun 1966 yang menjadi komite legislatif dan juga pada tahun 1970, ada komite kesehatan dan kesejahteraan yang juga dipengang oleh seorang perempuan yaitu Ivy Wedgwood (Commonwealth, 2019).

Ketika menjabat sebagai perdana menteri tahun 2010, Julia Gillard semakin memberikan keterbukaan dan keterwakilan dari perempuan dalam berpolitik, juga ketika menjadi wakil perdana menteri perempuan pertama pada tahun 2007. Dalam Konferensi Konstitusional Perempuan yang diadakan pada Juni 2002, salah satu senator Amanda Vanstone mengatakan bahwa *“One hundred years ago, women got the right to vote and to stand for Parliament ... These rights having been fought for by women and men are meant to be used and used not in part but in full. We cannot say that has happened until we have something like 50 per cent representation in federal Parliament. And when we have 50 per cent of the Parliament, we should be aiming for 50 per cent of the Ministry and Shadow Ministry and 50 per cent of the Cabinet.”* (Despoja, 2002). Dalam hal ini, perempuan Australia sangat menginginkan adanya kesetaraan pekerjaan di jabatan perpolitikan negara. Berusaha untuk hak-hak keseluruhan dari kaum perempuan diperjuangkan oleh perempuan dan laki-laki tanpa mengesampingkan gender.

Perempuan memang secara hak pilihnya, mendapati kecenderungan yang lebih menjadi pemilih yang konservatif daripada kaum laki-laki yang memang sebagian besar haknya terlihat dan mendominasi dan hal tersebut memang diketahui oleh semua lapisan masyarakat internasional. Dan memang pandangan

terhadap hal tersebut didasarkan pada banyak penelitian yang dilakukan oleh kelompok menggebrak kesetaraan gender secara metode yang dirasa kurang terwakilkan suara perempuan, seperti pada penelitian *The Political Role of Women* yang terbit tahun 1955 terkait dengan gambaran yang memang terlihat peran perempuan yang cenderung konservatisme (Duverger, 1955). Banyak penelitian yang dilakukan sekitar tahun 1950-an dan 1960-an yang sebagian besar teorinya tidak memasukkan gender sebagai hal penting dalam konteks pemilihan umum.

Bahkan politikus Australia, Goot dan Reid, menganalisis bahwa kuesioner penelitian seringkali hanya menggunakan subyek laki-laki sebagai konteks penting dan mengesampingkan perempuan dalam memilih, juga digambarkan hak suara perempuan berdasarkan suara dari suami atau ayah mereka (Reid, 1975). Memang pada awal penelitian, perempuan dianalisis sebagai sampel, namun terlepas dari hal itu, perilaku dan peran dari perempuan tidak dianalisis dengan detail dan beranggapan bahwa kecenderungan dan minat perempuan dalam dunia perpolitikan adalah terfokuskan pada peran laki-laki. Meskipun dalam survey penelitiannya sebanyak 43 persen dari perempuan mengatakan bahwa mereka juga minat dalam dunia politik (Reid, *Women and Voting Studies : Mindless Matrons or Sexist Scientism*, 1975).

## **BAB III**

### **ANALISIS STRUKTURAL KETERWAKILAN PEREMPUAN DI AUSTRALIA DALAM PERSPEKTIF FEMINISME POST STRUKTURALIS**

#### **3.1. Analisis Pengaruh Kuota Perempuan Terhadap Hak Terpilih di Parlemen Australia**

##### **3.1.1. Identifikasi Kesetaraan Gender di Parlemen Terhadap Prinsip**

###### **Maskulinitas**

Kesetaraan gender diartikan adalah hal yang mendasar dari hak asasi manusia dimana kesetaraan gender dapat menyelamatkan banyak peran dari perempuan dan anak perempuan dalam kehidupan. Ketika kesetaraan gender tidak terealisasi dengan baik, maka sebagian besar dari korbannya adalah peran perempuan dalam hal pendidikan, kesehatan, penghidupan karier di jenjang yang lebih tinggi. PBB bahkan mengatakan bahwa kesetaraan gender adalah penting, mengingat hal tersebut adalah untuk mencapai masyarakat yang damai dengan pembangunan berkelanjutan yang rata. Di Negara Australia sendiri, kesetaraan gender diberlakukan undang-undang khusus untuk memastikan setiap orang mendapatkan keadilan tanpa pandang gender.

Seperti dalam Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women di tahun 1983, dimana penandatanganan konvensi tersebut adalah salah satu bentuk cara Negara Australia dalam berkomitmen untuk melindungi kesetaraan gender yang terkait dalam kebijakan, perundang-undangan,

struktur dalam jabatan, kuota parlemen, dan dukungan untuk mensukseskan kesetaraan gender (Activities, 2012). Sebagai penandatanganan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan diskriminasi perempuan, pemerintahan Australia diminta untuk melaporkan kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Perempuan di tahun 1997. Dan hasilnya adalah penurunan keterwakilan posisi dari perempuan di parlemen dan Australia dianggap gagal dalam memenuhi standar internasional hak keterwakilan untuk perempuan dalam partisipasi politik negara, tindakan afirmatif dan kesamaan di mata hukum.

Sifat-sifat dalam perkembangan maskulinitas di perpolitikan sering diartikan pada ketidaksetaraan gender dari pada cara mengatasinya. Banyak kritik yang datang melalui perspektif post-strukturalis di mana dalam kursi parlemen banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Sifat-sifat maskulinitas dipahami adalah contoh dari norma dan perilaku yang didasari pada menjadi laki-laki seperti agresif dan kuat dan banyak yang beranggapan bahwa hal tersebut ada untuk menentang feminisme perempuan. Dalam tulisan *Hegemonic Masculinity* karya Carrigan, Connell, dan Lee yang membahas terkait dengan maskulinitas, mereka mengatakan bahwa feminisme marxis dan teori dari hegemoni budaya terkait dengan teori maskulinitas di mana berpendapat bahwa laki-laki selayaknya menganut dan berusaha menunjukkan sifat asli dari seorang laki-laki dalam dirinya sehingga identik dengan identitas maskulin. Sehingga hal tersebut membuat kaum laki-laki memiliki kesempatan yang mendominasi terhadap akses dari tingkat kekuasaan dalam status di masyarakat (Waling, 2019).

Ada beberapa istilah untuk jenis dari maskulinitas yang dicetuskan oleh Andrea Waling, yang pertama adalah *toxic masculinity*. Diartikan sebagai masalah

sosial, politik, budaya dan ekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat (Waling, 2019). Dalam hal ini, banyak kontroversi terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen politik Australia di mana masih mempermasalahkan keadaan pribadi seorang perempuan ketimbang bagaimana jalannya pemilihan umum. Julia Gillard mencalonkan diri dalam pemilihan umum, namun masih banyak pihak yang mempermasalahkan keadaan sosial Gillard yang belum berkeluarkan dan lebih memilih karier. Dampak dari adanya *toxic masculinity* adalah mengesampingkan historis dari seorang perempuan secara sistematis dan structural kepemimpinan dalam institusional negara dan dominasi peran dari laki-laki. Hal tersebut membuat kesan bahwa laki-laki dan struktur sistematis dan sosial menjadi sangat mendominasi.

Yang kedua adalah *healthy masculinity* yang diartikan sebagai kesetaraan gender yang diakui dan dihargai terlepas dari siapapun identitas gender seseorang. Pandangan maskulinitas dalam masyarakat terletak pada hal yang melibatkan laki-laki dalam mengambil sikap dan sebaliknya memusatkan perhatian untuk laki-laki daripada penanganan masalah ketidakseimbangan gender dalam perempuan yang mana merupakan devaluasi feminitas yang dianggap tidak maskulin. Dalam kata lain, terkait mendorong peran laki-laki untuk mencari *healthy masculinity*, masyarakat perlu untuk memahami aspek-aspek dan dasaran yang menjadi kontroversi perihal feminitas dan terus mendukung perbedaan kepribadian tanpa bias gender. Dalam hal ini Chodow mengatakan bahwa gender dapat dikonstruksikan secara budaya, tetapi hal tersebut adalah pengelompokan dalam hal budaya yang secara mendasar dihubungkan ke dalam keadaan individu di mana



dapat dikatakan bahwa maskulinitas bisa secara paksaan budaya dan dinegosiasikan secara individu (Waling, 2019).

Dalam parlemen perempuan di Australia, perempuan cenderung dikesampingkan dalam hal banyaknya kuota. Ketika Julia Gillard menjabat sebagai perdana menteri tahun 2010, permasalahan yang dihadapi adalah memfokuskan peran Gillard yang belum menikah dan memiliki anak. Banyak media yang mempermasalahkan hak-haknya sebagai moral dari seorang perempuan. Seorang politisi, Van Acker mengatakan bahwa fokus dari publikasi media pada politisi perempuan adalah terkait dengan kehidupan pribadinya, seperti keluarga, dan mengesampingkan aktivitas politik yang menjadi nilai penting pemilihan umum (Acker, 1999). Dan masih banyak yang berpendapat ketika seorang laki-laki bekerja bahkan dalam dunia politik, dan mereka memiliki anak, hal tersebut tidak menjadi permasalahan yang kompleks karena pada dasarnya seorang laki-laki adalah bekerja dan tidak memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurus anak. Kesenjangan tersebut yang akan menjadi pembahasan pada subbab ini, bagaimana keberlanjutan dari peran perempuan di Australia adalah sebagai pemotongan hak dalam kehidupan politik.

Kandidat perempuan dalam parlemen sering menjadi sasaran dalam penggambaran media yang kontroversi terhadap ketidaksetaraan gender khususnya perempuan. Komentar dari Senator Pemerintah Bill Heffernan dalam wawancara Buletin tahun 2007 mengatakan bahwa wakil dari pemimpin tenaga kerja buruh, Julia Gillard tidak cocok untuk memimpin bangsa karena status pernikahannya. Heffernan menjelaskan bahwa untuk memahami seseorang terlebih dahulu mengetahui kondisi keluarga dan pada saat itu Gillard pun belum menikah. Gillard

sebelumnya juga telah menjadi sasaran dari komentar-komentar yang mengesampingkan kesetaraan gender dari media. Hal ini menjadi perdebatan penting dalam melihat peran gender terkait apakah melahirkan anak membuat seorang perempuan akan menjadi lebih baik dalam perwakilan parlemen. Pada saat itu, parlemen perempuan berargumen bahwa pengalaman dari perempuan sebagai ibu apakah akan memperluas pandangan terhadap terwakilkannya perempuan di parlemen sehingga dengan demikian meningkatkan kualitas dari kebijakan (Sawer, 2008).

Selama pemilu 2007, kaum perempuan relative tidak bersuara. Dalam situs web pemilihan keterwakilan perempuan *Women's Health Goulburn North East* menjadi sorotan karena berisi masalah-masalah pribadi seorang perempuan seperti cuti hamil yang dibayar, perawatan anak, gaji dan pension yang sama dan perhatian diarahkan pada kebijakan partainya. Namun disisi lain, Partai Buruh membawa peningkatan dalam jumlah kuota keterwakilan perempuan yang awalnya adalah 20 menjadi 27 dalam jumlah perempuan di Partai Buruh dan secara keseluruhan di *House of Representative* juga meningkat hingga 40 sama dengan persentase mencapai 26.7 persen. Hal tersebut sedikit meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan Australia dalam penilaian internasional untuk representasi perempuan di parlemen nasional. Peringkat tersebut membawa sedikit perubahan untuk keterwakilan perempuan di Australia karena dalam peringkat IPU, Australia telah tertinggal dalam memberikan kesetaraan hak untuk perempuan membela bangsa di parlemen pada tahun 1902 (Sawer, 2008)

Dalam data World Economic Forum's Global Gender Gap Index, pada tahun 2006, Australia mendapati peringkat 15 di mana kesetaraan gender terlihat

baik. Di tahun 2018 posisi yang didapati Australia adalah 39 dari 149 negara. Namun di tahun 2020 ini, Australia mendapati peringkat 44 di mana peringkat sangat menurun dan jumlah dari kesetaraan gender tidak meningkat begitu pesat. (Rowe, 2019).

**Tabel 3.1: Indeks Global Gender Gap**

Kriteria Gender Gap	Nilai di Tahun 2006		Nilai di Tahun 2020	
	Peringkat	Nilai	Peringkat	Nilai
Indeks Global Gender Gap	15	0.716	44	0.731
Partisipasi Ekonomi dan Keuntungan	12	0.726	49	0.7222
Tingkat Pendidikan	1	1.000	1	1.000
Kesehatan dan Perkembangan	57	0.976	104	0.971
Jabatan Politik	32	0.163	57	0.231

Sumber: World Forum's Global Gender Gap Index

### **3.1.2. Analisis Pengaruh Peran Perempuan di dalam Parlemen Melalui Kebijakan Australia Labor Party**

Setelah pemilihan umum pada tahun 2016 di Australia, keterwakilan perempuan di parlemen pemerintahan sedikit meningkat dari 69 kuota perempuan menjadi 73 perempuan. Dan juga jumlah dari kuota perempuan di House of Representative mendapat peningkatan dari 43 menjadi 40 perempuan. Namun jumlah-jumlah dari kuota perempuan tersebut masih dirasa kurang untuk mencapai kesetaraan gender dan bahkan dalam peningkatan kesetaraan gender di negara lain (Hough, 2016). Pengaruh dari Australia Labor Party (ALP Partai Buruh) pada tahun 1996 masih tidak terlihat peran aktifnya. Bahkan sebagian besar dari perempuan disana masih cenderung untuk tidak mendukung ALP. Dukungan untuk ALP pada saat itu sekitar tiga sampai 5 persen poin dibawah laki-laki (Khan, 2000). Namun pada tahun 1998 ada perubahan dimana isu gender dalam peran perempuan di jabatan politik sedikit terlihat. Pemilih untuk partai ALP sekitar 37 persen setara antara pemilih laki-laki dan perempuan. Terdapat kebijakan yang dikeluarkan dari ALP terkait dengan penambahan jumlah kuota untuk perempuan agar bisa andil dalam perwakilan di parlemen.

**Tabel 3.2 Komposisi Parlemen ke-45 berdasarkan partai dan gender**

Pesta	Dewan Perwakilan Rakyat			Senat			Total Parlemen		
	M	F	% F	M	F	% F	M	F	% F
Partai Buruh Australia	41	28	41	12	14	54	53	42	44
Partai Liberal	48	12	20	18	6	25	66	18	21
Warga negara	15	1	6	3	2	40	18	3	14
Partai Liberal Negara				1		0	1		0
Partai Hijau Australia	1		0	4	5	56	5	5	50
Partai Keadilan Derryn Hinch				1		0	1		0
Pihak Keluarga Pertama				1		0	1		0
Jacqui Lambie Network					1	100		1	100
Partai Australia Katter	1		0				1		0
Partai Demokrat Liberal				1		0	1		0
Tim Nick Xenophon		1	100	2	1	33	2	2	50
Satu Bangsa Pauline Hanson				3	1	25	3	1	25
Independen	1	1	50				1	1	50
<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>46</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>153</b>	<b>73</b>	<b>32</b>

Pada komposisi kuota perempuan di parlemen yang ke-45 tahun 2016-2019, ALP mendapati di urutan nomor satu dalam partai di Australia dengan kuota parlemen perempuan terbanyak jika dibandingkan dengan partai besar lain di Australia. Jumlah kuota dari perwakilan House of Representative mencapai 41 persen dengan kuota perempuan sebanyak 28 perempuan yang mendapatkan posisi tersebut. Kemudian di Senat pun, keterwakilan perempuan mencapai 54 persen dengan kuota perempuan sebanyak 14 perempuan. Dapat dilihat bahwa peran dari

kebijakan kuota dalam ALP sangat terlihat akan kesetaraan gender. Peran dari ALP sangat terlihat ketika partai ini membuat suatu kebijakan dengan menekankan kuota partai buruh yang cukup banyak bagi perempuan. Dan kebijakan kuota tersebut terlihat dalam pemilihan pemilu pada tahun 2010 di mana seorang Perdana Menteri perempuan pertama dapat terpilih dari salah satu perwakilan perempuan dari partai ALP. Kampanye di tahun 2010 terlihat bahwa ALP berpotensi untuk mempromosikan minat, kesadaran, dan keterlibatan untuk meningkatkan peran perempuan.

Dalam penjabatan Julia Gillard sebagai perdana menteri pertama sangat terlihat kontroversi dalam pandangan masyarakat Australia dan ditekankan untuk menjadi evaluasi kepemimpinan ketika perempuan terpilih. Karena memang pada dasarnya pemilihan umum sangat sering memiliki pandangan sendiri terhadap kekuatan perempuan dan masih menjadi stereotip yang sangat berlebihan untuk perempuan menjabat dengan masih mempertahankan pandangan pandangan perempuan dengan ciri ciri maskulinitas dalam perpolitikan dan ketika perempuan menjabat terlihat hal tersebut melanggar stereotip gender pemikiran tradisional. *Australian Labor Party* memiliki sistem struktural yang berbeda terkait dengan permasalahan gender. ALP memahami bahwa kesetaraan gender perlu untuk diperjuangkan mengingat perempuan memiliki hak yang sama untuk bisa berkontribusi dalam anggota parlemen perpolitikan. Pada tahun 1994, mulai diterapkan kuota untuk perempuan menjabat dan ikut andil dalam pencalonan pemilihan umum Australia. Dan representasi kuota perempuan hingga saat ini mulai meningkat dan hampir mencapai persentase 50 persen atau terlihat dua kali lipat jumlah perempuan dalam pemerintahan.

Tingkat kuota laki-laki yang sangat tinggi dalam parlemen menyebabkan keterwakilan perempuan membutuhkan upaya yang lebih keras lagi jika dibandingkan dengan laki-laki ketika perempuan menginginkan ikut andil dalam pemilihan umum. Banyak anggapan bahwa politik pemerintahan merupakan tempat berkompetisi untuk kaum laki-laki dan ketika perempuan ingin masuk ke dalam pemerintahan hal konstruksi sosial didasari yang mengandung nilai maskulinitas. Menguatnya nilai-nilai dan kebijakan yang didasari pada sifat maskulin menyebabkan terjadinya tekanan pada sistem pemerintahan Australia. Aturan dari konstitusi nasional Partai Buruh saat ini mendasari jumlah yang sama pada kuota jabatan parlemen antara perempuan dan laki-laki di semua tingkatan dalam organisasi dan dalam pemilihan jabatan publik (Wilson D. J., 2012).

*National Labor Women's Network* merupakan salah satu upaya Partai Buruh untuk meningkatkan kesetaraan keterwakilan perempuan di mana mulai digagas pada tahun 1996 dalam *National Australian Labor Party Conference*. Hal ini mendorong perempuan untuk selalu berpartisipasi dalam tingkatan di structural partai, pemerintahan, dan nasional. *Emily's List* juga merupakan *women's network* yang didirikan oleh kaum perempuan di Partai Buruh tahun 1996 yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial, politik, dan dukungan pribadi terkait dengan pencalonan kandidat perempuan Buruh dan berkaitan dengan permasalahan kesetaraan gender lainnya. Dukungan untuk membuat *Emily's List* sangat berperan penting dalam menaikkan kuota pemilihan untuk perempuan dalam kampanye pemilihan parlemen Australia (Wilson D. J., 2012).

Pencabutan mandate Perdana Menteri Julia Gillard pada tahun 2013 menyebabkan kekalahan pada Partai Buruh. Pada pemilihan federal Australia ke-

44 sejak Federasi diadakan pada tahun 2013, Partai Buruh menggantikannya dengan Kevin Rudd yang kembali ke jabatan perdana menteri untuk masa jabatan kedua. Kepemimpinan Partai Buruh dari Rudd ke Gillard ke Rudd lagi dimaksudkan untuk membuat Partai Buruh agar lebih kompetitif, namun pada kenyataannya hanya membuat perspektif masyarakat terkesan bahwa Partai Buruh secara internal terlihat memecah belah, kepemimpinan yang tidak selayaknya dalam pemerintahan. Begitu Rudd kembali dilantik sebagai perdana menteri, hampir dari setengah bangku pendukung Gillard menolak dan mencawarkan pengunduran diri mereka dalam bentuk massal, dan Sembilan dari menteri untuk memilih keluar dari politik pada pemilihan yang akan datang. Oleh karena itu, pelayanan kepemimpinan Rudd kedua dimunculkan masalah pengunduran diri di parlemen (Wanna, 2014).

Dalam catatan dukungan elektoral kemenangan pemilu Partai Buruh dari tahun 1996, sekitar 6.33 persen lebih menerima suara pilihan dari dua partai sehingga memperoleh sekitar 23 kursi tambahan dari dua partai yaitu banyak dari pemilih regional dan delapan kursi dari Queensland. Penutupan kesenjangan gender pada pemilihan umum di tahun 2007 dengan pemilih perempuan adalah salah satu representasi dari hasil kebijakan Partai Buruh. Kemenangan Partai Buruh pada pemilu 2007 merupakan gabungan dari dua faktor di antaranya adalah kemampuan Kevin Rudd dan Partai Buruh untuk mengubah dan menyajikan alternatif yang dipercaya dengan menampilkan sosok kepemimpinan. Partai buruh memenangkan kepercayaan bagi rakyat Australia dan menghancurkan mitos bahwa pandangan rakyat secara tersirat terkait dengan kepemimpinan yang konservatif dan loyalis (Gartrell, 2009). Dalam konteks ini, tingkat perempuan mulai



berkembang dan diintegrasikan ke dalam pekerjaan penuh waktu atau standar untuk hasil ekonomi dan keuangan untuk pemberdayaan status dan kesehatan sehingga dapat mempertimbangkan prospek perempuan di masa depan terkait dengan kesetaraan gender di Australia. Segregasi gender masih sangat mendominasi di Australia dan masih menjadi pola bahwa peran perempuan masih terbatas dalam hal pekerjaan. Pada tahun 2002, keterwakilan perempuan dalam pekerjaan sekitar 55,8 persen dan pekerjaan tersebut hanya seputar pekerjaan yang feminine (Preston, 2010).

Proporsi perempuan di parlemen Australia memuncak sebanyak 31 persen pada tahun 2009, namun memang sedikit menurun 28 persen di tahun 2013. Partai Buruh memperkenalkan kuota perempuan yang dimasukkan adalah untuk mencapai hasil yang tidak kurang dari 40 persen kursi parlemen yang dipegang oleh Partai Buruh adalah kaum perempuan yang tidak kurang dari 40 persen kaum laki-laki. Partai konservatif di Australia ini masih percaya bahwa kuota pemilihan umum adalah untuk melindungi perempuan yang didasari pada prestasi. Di sisi lain Partai Liberal Australia masih jauh dalam proses kesetaraan gender oleh calon perempuan dimana masih menerapkan pemahaman tradisional terkait dengan status perkawinan. Akibat dari perbedaan budaya politik dalam suatu partai besar di Australia, masih dalam tahap mengatasi permasalahan representasi perempuan. Sekitar Februari tahun 2013, 38 persen perempuan dalam Partai Buruh berada di parlemen di seluruh Australia dimana membentuk pola representasi perempuan dalam Partai Buruh (Sawer, *Misogyny and Misrepresentation : Women in Australia Parliaments*, 2013).

Meskipun puncak dari keterwakilan perempuan di parlemen meningkat di tahun 2009 dari data Inter Parliamentary Union's League Table, perempuan dalam posisi kepemimpinan terus meningkat. Anggota parlemen dari keterwakilan perempuan menjadi beragam. Misalnya, wanita pertama yang terpilih dari Aborigin pada anggota parlemen tahun 2001 di Australia Barat dan Northern Territory dan menjabat sebagai menteri di Partai Buruh. Dan juga di New South Wales, Linda Burney terpilih dalam parlemen di tahun 2003, memasuki cabinet di tahun 2007, dan di tahun 2011 menjadi wakil pemimpin dalam Partai Buruh.

**Tabel 3.3 Keterwakilan Perempuan dalam Kepala Pemerintahan**

Nama Perempuan	Partai	Yurisdiksi	Jabatan	Tahun
Rosemary Follett	ALP	ACT	Chief Minister	1989
Carmen Lawrence	ALP	WA	Premier	1993
Joan Kirner	ALP	Victoria	Premier	1990
Kate Carnell	Liberal	ACT	Chief Minister	2000
Clare Martin	ALP	NT	Chief Minister	2001
Anna Bligh	ALP	Quensland	Premier	2007
Kristina Keneally	ALP	NSW	Premier	2009
Julia Gillard	ALP	Commonwealth	Prime Minister	2010
Lara Giddings	ALP	Tasmania	Premier	2011
Katy Gallagher	ALP	ACT	Chief Minister	2011

Sumber: Inter-Parliamentary Union Februari 2013

Kehadiran perempuan dalam politik perlemen Australia masih jauh dari standar kesetaraan, namun tetap berkembang di setiap tahunnya. Yang menjadi perdebatan adalah ketika keterwakilan perempuan menduduki jabatan tinggi dalam politik seperti gubernur jendral, perdana menteri, dan ketua House of Representative, kaum perempuan selalu menjadi sasaran terkait dengan komentar mendasar tentang status personal dan perlakuan diskriminatif. Pada tahun 2012 terjadi perubahan besar dimana Gillard dengan berani mengatakan adanya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan politik sehingga menjadi poin penting ketika perwakilan perempuan dengan lantang mengatakan adanya ketidaksetaraan gender. Hal ini penting untuk dipahami dalam politik Australia karena ketika perempuan harus diam atas perlakuan diskriminatif agar tidak dituduh oleh pandangan terkait dengan permainan *gender card* sehingga banyak perempuan yang mengalami perlakuan yang sama (Sawer, Misogyny and Misrepresentation : Women in Australia Parliaments, 2013).

## **3.2. Implementasi Struktural Keterwakilan Perempuan di Australia Dalam Perspektif Feminisme Post Strukturalis**

### **3.2.1. Analisis Pengaruh Glass Ceiling dalam Perspektif Feminisme Post Strukturalis**

Feminisme telah menjadi pokok pembahasan yang kompleks dalam banyak negara terhadap obyektivitas keberadaannya. Sejarah dari feminis adalah studi peran perempuan dalam ilmu sosial di mana batasan terhadap peran seorang perempuan dalam ilmu sosial. Sandra Harding menjelaskan kaitannya dengan feminis adalah subjek dan objek, ketika subjeknya adalah kaum laki-laki dan objeknya adalah perempuan dan sifat yang diterima oleh masyarakat umum. Dalam hal ini, konsep dari feminisme post strukturalis menjelaskan bahwa peran dari perempuan adalah kekuatan obyektivitas, dimana peran dari perempuan dalam jabatan parlemen perpolitikan dilihat dari structural Australia dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam meminimalisir keberadaan glass ceiling. Julia Gillard merupakan salah satu dari banyak actor perempuan yang memutuskan untuk terjun ke dalam lingkungan perpolitikan dan pada tahun 2010, Gillard terpilih menjadi Perdana Menteri Perempuan pertama di Australia. Banyak dari kelompok tertentu yang menentang adanya pemilihan seorang perempuan yang duduk untuk memimpin sebuah negara. Ketika Gillard menjabat, permasalahan terkait isu-isu glass ceiling sangat diperdebatkan.

Gillard muncul dalam pemilihan umum Australia dengan belum adanya peran sebagai seorang ibu. Pada saat itu, Gillard belum menikah dan belum memiliki anak di usia 49 tahun ketika menjabat sebagai perdana menteri. Banyak media yang justru terfokus pada urusan pribadi seseorang dimana banyak yang

mempermasalahkan seorang perempuan yang belum menikah. Hal ini dipahami bahwa masih ada budaya-budaya yang mempermasalahkan gender dalam dunia politik tentang keterwakilan kaum perempuan yang menyebabkan terhambatnya kedudukan perempuan dalam parlemen. Teori dari feminisme bentuk post strukturalis yang dikemukakan oleh Sandra Harding adalah suatu teori yang menjabarkan perihal peran-peran dari kekuatan yang menekan objektivitas perempuan dalam kaitannya struktur dalam kedudukan parlemen pemerintahan Australia. Australia sendiri masih terbilang lambat dalam mengembangkan keterwakilan perempuan dalam institusi pemerintahan seperti dalam parlemen.

Sangat mendominasi kebijakan-kebijakan dalam sifat-sifat yang menggambarkan maskulinitas. Permasalahan *glass ceiling* banyak menyangkut tingkat representative perempuan di parlemen dan hambatan perempuan. Birokrasi parlemen memang sangat identic dengan kaum laki-laki dan memunculkan adanya pandangan maskulinitas yang menjadikan peran dan posisi dari perempuan terpinggirkan dan menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender dalam perpolitikan. Jika kita kaitkan dengan teori dari Sandra Harding tentang permasalahan glass ceiling terhadap struktur kesetaraan gender, kaum perempuan sudah terbiasa dalam pandangan yang menuntutnya menjalani nilai nilai dari maskulinitas ketika berada dalam suatu parlemen politik yang mana dapat mempengaruhi struktur konstruksi sosial perempuan sehingga terbentuk suatu istilah strong objectivity (peran perempuan yang kuat) yang menyebabkan ada pandangan dari perempuan yang memutuskan untuk memikirkan kembali ketika ingin terjun dalam dunia perpolitikan.

Ada salah satu kasus di mana seorang anggota perlemen pemerintahan Australia, Julia Banks dari Partai Liberal mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengikuti pemilihan berikutnya karena banyak dari hal hal yang menyebabkan dirinya terintimidasi dalam proses di parlemen sebagai perempuan dan bias budaya dan gender masih terlihat nyata dalam politik masyarakat. Banks mengatakan bahwa ada fenomena di mana parlemen laki-laki yang melecehkan perempuan. Selain itu, Bank juga mengatakan bahwa politik di Australia mendapati kekacauan bias gender dan menyebabkan Banks memutuskan untuk keluar dari anggota parlemen. Dalam kenyataannya, pada kepemimpinan Tony Abbott pun, di tahun 2013, pada saat itu, pemerintah banyak mendapatkan demonstrasi terkait kuota perempuan yang hanya beranggotakan 19 orang (News, 2018). Secara kenyataan memang, Partai Liberal memiliki problem besar terkait dengan representasi perempuan di anggota parlemen.

Bicara tentang feminisme di Australia adalah suatu yang harmonis namun lebih kepada perdebatan keras tentang feminisme Australia di permasalahan internasional. Pendekatan feminisme kritis, post-modern, liberal, dan radikal menghasilkan perdebatan terkait dengan pendekatan teoritis di beberapa disiplin ilmu. Diantaranya adalah terkait dengan perwakilan perempuan dalam kursi parlemen. Banyak para feminis mengatakan bahwa perempuan memiliki keterikatan bawaan terkait dengan feminis kebudayaan dan mengatakan bahwa hal tersebut memiliki keterikatan terhadap keterwakilan perempuan dalam pemberdayaan perempuan secara politik. Dalam penelitian Nicole George juga menjelaskan bahwa perdebatan terkait keterwakilan perempuan juga terletak pada tingkat politik, aktivisme perempuan di dunia politik, dan menunjukkan

legitimasinya terlibat dalam politik perdamaian. Dan hal tersebut dapat terlihat suatu bentuk aktivisme perempuan yang terbukti dalam menantang feminis tentang keberagaman budaya, konteks politik, ekonomi, sosial, dan agama dalam suatu wilayah (Koo, 2010).

Kesetaraan gender adalah isu internasional yang selalu dipahami bahwa bagian dari peran perempuan memiliki konsekuensi besar di mana status dari keterwakilan perempuan di perpolitikan masih bergantung pada kebijakan maskulinitas yang tegas. Kesenjangan antara peran perempuan dan laki-laki terlihat dalam pembagian jabatan perpolitikan parlemen Australia karena masih didasarkan pada prinsip dan peran laki-laki yang mana menjadikan gender pada letak yang dikesampingkan. Adanya kuota dari perempuan di parlemen Australia dipahami bahwa masih sedikitnya peran dari perempuan yaitu dalam posisi perempuan di senat terdapat 15 persen perempuan dan 85 persen laki-laki. Kemudian di posisi dewan perwakilan Australia terdapat 9 persen perempuan dan 91 persen laki-laki (Wilson, 2014). Kesenjangan dari peran perempuan adalah suatu situasi adanya glass ceiling dalam parlemen Australia. Glass ceiling merupakan konsep dasar yang menjelaskan bagaimana peran perempuan yang menjadi peran minoritas dan terhambat untuk meningkatkan kemampuan dalam berkarier ke tingkatan yang lebih tinggi di suatu institusi.

Glass ceiling dapat dipahami bahwa peran dari seorang perempuan sangat terikat dari pandangan tradisional di mana perempuan masih tetap terlihat ada hambatan yang membuat perempuan sulit untuk terlibat dalam karier politik misal karena adanya hambatan menjadi ibu untuk mengurus keluarganya sedangkan laki-laki dengan leluasa menaiki karier tanpa hambatan tersebut. Dalam dunia politik

pemerintahan, perempuan dituntut untuk menjadi personal dengan sifat maskulinitas agar bisa menduduki posisi strategis. Dan dalam kata lain, kaum perempuan dituntut melakukan *hard politics* sebagai upaya perempuan untuk menyingkirkan pandangan *glass ceiling*, artinya perempuan dituntut untuk memaklumi keadaan di mana peran dari kebijakan maskulinitas menjadi hal yang wajar sehingga kaum perempuan yang berada dalam jabatan parlemen perlu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan.

Di tahun 2012 tepatnya tanggal 9 Oktober, Perdana Menteri Australia, Gillard pada saat itu dalam pidatonya mengatakan terkait seksisme dari kepemimpinan oposisi Tony Abbott. Gillard memberikan contoh untuk mendukung tuduhannya dan menceritakan terkait pelanggaran yang dilakukan Abbott yang mengesampingkan kesetaraan gender. Abbott banyak menyinggung seorang perempuan yang secara biologis kurang cocok untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan politik daripada kaum laki-laki dengan menyangkut pautkan terkait cuti hamil dan perempuan yang belum menikah. Dalam pidato Gillard secara umum telah mempertimbangkan bagaimana pidato di media sosial dapat memanfaatkan dan memperkuat argument yang dirasakan oleh politisi kaum perempuan. Politisi perempuan merasa bahwa mereka diharuskan untuk melakukan dan menunjukkan kualitas dari pandangan maskulin tentang ketangguhan dan kekuatan tanpa mempertimbangkan ekspektasi feminine dalam pribadi perempuan ketika menjabat dalam dunia politisi (Donaghue, 2015).

Ciri utama dalam mengenali adanya *glass ceiling* pada perempuan adalah dilihat dari kemajuan hukum dan sosial yang dibuat untuk perempuan dan dengan membandingkan kebebasan nyata perempuan Australia dalam ketertindasan suara



nasional. Hal tersebut kemudian dapat dipahami terkait dengan bagaimana struktur sosial masyarakat mengabaikan kesetaraan gender dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan Australia sebagai masalah utama ketika memutuskan untuk bergabung ke dalam parlemen pemerintah. Implementasi dari adanya seksisme ini didasari pada penolakan keberadaan struktur sistematis dari gender. Memang pada dasarnya perbedaan dalam kehidupan dan sifat alamiah perempuan dan laki-laki jelas ada, namun akibat dari adanya perbedaan alami tersebut yang menyebabkan kepemimpinan mereka juga akan berbeda. Budaya dari feminisme ini tidak hanya menyangkal seksisme dan masalah dari perempuan, hal ini juga menyebabkan menurunnya semangat perempuan akan diskriminasi. Dalam beberapa hal, Julia Gillard adalah seorang post-feminisme. Dalam wawancara pada saat Gillard menjadi perdana menteri, banyak dari pidatonya yang ia hindari untuk melabeli dirinya sendiri sebagai seorang yang feminis dan mengecilkan arti dari keberadaan wanita pertama yang menjabat menjadi perdana menteri di Australia (Donaghue, 2015).

Ada satu peristiwa di mana Julia Gillard menggambarkan kondisi parlemen ketika mendapati perempuan pertama menjadi perdana menteri. Dalam pidato Gillard yang mengatakan mosi tidak percaya pada Federal Parlemen Australia, Peter Slipper yang mana melibatkan tuduhan pelecehan seksual dalam parlemen terhadap Slipper. Mosi tidak percaya yang diutarakan Gillard dalam pidatonya adalah terkait dengan komentar-komentar yang diutarakan Slipper terhadap kepemimpinan dan penggambaran anggota parlemen kaum perempuan yang diartikan sebagai '*ignorant botch*' orang bodoh. Hal inilah yang dimaksudkan dasar untuk memahami logika budaya yang menjadi pemahaman hubungan sosial dalam

parlemen yang bermasalah. Sebagian besar dari daya Tarik pidato Gillard adalah kaitannya dengan sikap yang ditunjukkan ketika berpidato, dapat dilihat dari kemarahan dan emosi yang ditunjukkan. Memang pidato Gillard dikatakan melanggar norma feminine untuk kebaikan dan kesopanan, namun disisi lain, dapat terlihat bahwa hal tersebut mempertaruhkan dan menegaskan bahwa ada stereotip perempuan yang harus dihilangkan dan emosional untuk gambaran kerasnya jabatan tinggi untuk seorang perempuan dalam parlemen pemerintah (Donaghue, 2015).

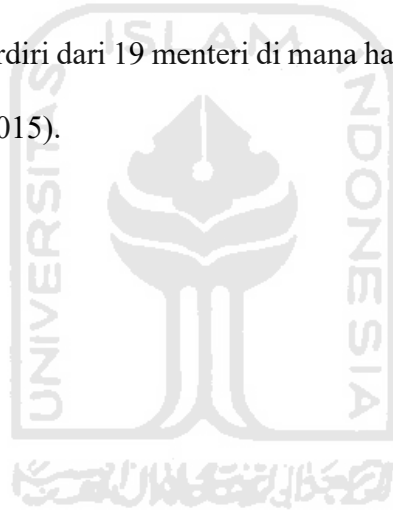
Menguatnya nilai dari maskulinitas pada birokrasi kepemimpinan parlemen menjadi suatu gambaran terkait dengan tekanan yang diciptakan pada jabatan tersebut. Parlemen memang identik dengan keterwakilan kaum laki-laki. Hal tersebut membuat peran dan posisi dari kaum perempuan terasingkan dan menciptakan perbedaan mendasar akan kekuatan gender laki-laki dan perempuan di parlemen. Ketidaksetaraan gender yang terlihat dapat digambarkan sebagai stereotip perempuan yang menyimpulkan pengambilan keputusan yang didasari pada bias gender. Pidato Gillard dalam hal pelecehan seksual Abbott terhadap perempuan akan menyebabkan suatu traumatis di mana menjadi hambatan pada perempuan itu sendiri untuk menjabat dan meningkatkan karier di parlemen. Selain itu juga akan menyebabkan hambatan dari persaingan sesama perempuan tersebut karena jabatan parlemen yang mayoritas laki-laki tersebut membuat perempuan saling bersaing karena posisi jabatan untuk perempuan parlemen sangat minim.

Didasari pada Teori dari Sandra Harding, perempuan sudah banyak mengalami dominasi nilai maskulinitas di mana masih tersimpangnya peran perempuan dan kuota parlemen yang masih terbilang kurang terwakilkan oleh

perempuan menyebabkan perempuan itu sendiri yang nantinya akan menciptakan *strong objectivity* dalam pemahaman perempuan yang menyebabkan kaum perempuan akan enggan meningkatkan kariernya khususnya dalam dunia parlemen. Keberadaan dari nilai maskulinitas yang masih tertanam dan masih sangat kuat pada keberadaan kuota perempuan parlemen membuat nilai dari feminin di parlemen akan semakin dijauhkan sehingga kaum perempuan ketika ingin menjabat akan mengikuti kebijakan-kebijakan yang sangat maskulin dan menghambat perempuan untuk meningkatkan jabatan. Kecenderungan kebijakan dan pandangan akan maskulinitas parlemen juga menyebabkan struktur dari jabatan parlemen itu sendiri menyebabkan ketimpangan dan ketidaksetaraan perempuan (Donaghue, 2015).

Dapat dipahami bahwa dilihat dari esensi yang ada dalam pidato Gillard adalah terkait dengan tersentralnya masalah yang dihadapi Gillard ketika menjadi perdana menteri pertama. Ada beberapa pihak yang melihat pidato tersebut karena pelampiasan emosional, namun hal ini menjadi hal protes terkait kejadian feminis. Kaum perempuan yang memilih untuk membiarkan seksisme karena dia tidak cukup kuat untuk mengambil perubahan besar dan mengabaikan serangan seksisme dan membiarkannya. Sentralisasi permasalahan gender menjadi pemahaman terkait tuduhan seksisme yang diutarakan oleh perempuan yang mana dapat menciptakan pemahaman baru secara nyata karena pengalamannya. Menentang adanya seksisme adalah suatu tindakan yang besar, dalam kasus pidato Gillard ini, banyak yang mengesampingkan gender dengan mengatakan motif pribadi Julia Gillard. Padahal posisi Gillard sebagai yang memimpin bisa dibilang telah rusak karena adanya seksisme di kehidupan sosial maupun politik Australia.

Selain itu, tindakan Gillard tentang pidatonya dikatakan sebagai perusak dari peran perempuan yang berusaha untuk mencari kepemimpinan dan jabatan tinggi di parlemen. Dalam pemahaman gender Australia, pidato seperti Gillard menyebabkan pemberhentian sebagai perdana menteri pada Juni 2013 dan digantikan oleh partai oposisi. Pidato Gillard menjadi penilaian penting seksisme di Australia, seperti dalam kampanye 'Destroy The Joint' di media sosial dimaksudkan untuk mendorong kaum perempuan Australia untuk berbagi pengalaman terhadap isu seksisme di dunia politik. Dan dapat dipahami juga bahwa ketika Tony Abbott menggantikan Gillard menjadi perdana menteri Australia, parlemen dalam cabinet terdiri dari 19 menteri di mana hanya satu perempuan yang terwakilkan (Donaghue, 2015).



### **3.2.2. Analisis Dampak dari Kesetaraan Kuota Perempuan di Parlemen**

#### **Australia**

Pengaruh kesetaraan gender ketika berada di parlemen perpolitikan suatu pemerintahan sangat bergantung pada jenis kelamin seseorang. Bahkan ketika Julia Gillard menjabat sebagai perdana menteri tahun 2010, menunjukkan adanya stereotip gender yang mengakar dilihat secara kebudayaan sehingga hal tersebut dapat menghambat adanya keterwakilan perempuan untuk memenangkan posisi pemilihan umum. Stereotip yang mengharuskan pemimpin secara maskulinitas seperti seorang laki-laki yang banyak pandangan bahwa memiliki sifat yang tangguh, agresif dan tegas dan ketika perempuan menjabat yang terlintas adalah pemikiran bahwa perempuan memiliki sifat hangat, lembut dan cenderung pasif. Yang terlihat dalam pemilihan umum adalah sifat-sifat yang didasari pada harfiah seseorang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang mencari dan berusaha untuk menjabat dalam dunia politik masih dianggap kurang secara kredibilitas karena dunia perpolitikan dipandang menuntut ketangguhan dan kekuatan (Denemark, 2012).

Keterlibatan peran dari perempuan dalam pemilihan parlemen berpotensi memiliki dampak yang sangat khusus dari politik terhadap siapa yang menjadi pemilih, serta pilihan hak suara untuk pemimpin. Berdasarkan data survei dari studi pemilihan federal Australia pada tahun 2010, terlihat bahwa dampak adanya pencalonan Gillard memiliki kemajuan terhadap kekhasan gender dari sikap politik (Ian McAllister, 2011). Pemikiran menyimpang terhadap gender kepemimpinan adalah perempuan yang dinilai memiliki tingkat kepentingan dan pengetahuan yang rendah jika dibanding dari pencalonan laki-laki. Namun kenyataannya, dalam

pemilihan ini, terdapat peningkatan yang tinggi dalam keterlibatan peran perempuan. Ketika perempuan ikut andil dalam pemilihan umum, akan ada ketertarikan seperti mempromosikan kepentingan politik yang lebih besar karena mempertimbangkan keterlibatan dan kesadaran di antara pemilih perdana menteri. Peristiwa naiknya Gillard di calon perdana menteri menunjukkan sebuah pengaruh perempuan yang cukup besar antara tingkat kepentingan politik dan keterlibatan politik perempuan.

Seperti halnya pendapat dari Sosiolog, Marilyn Johnson yang mengatakan bahwa konsekuensi dari ketidakhadiran peran perempuan dalam ranah publik, penyebabnya adalah adanya dominasi maskulinitas dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Jika keterwakilan perempuan masih kurang dalam kesetaraan gender maka hal tersebut membuat perempuan tersebut tidak dapat bersuara dalam pemerintah. Banyak hal terkait dengan representasi perempuan dalam politik yang diperbincangkan. Misalnya keterwakilan perempuan di badan legislatif pemerintahan diperlukan ketika feminisme perundang-undangan harus diberlakukan karena pemegang dari jabatan perempuan cenderung lebih simpatik dalam hal feminis daripada kaum laki-laki yang cenderung menempati legislative pemerintah dengan banyak kuota yang diperuntukkan.

Pemilihan Umum tahun 2010 diperdebatkan oleh para pemilih untuk mempertimbangkan ciri-ciri khas dalam menilai pemimpin politik laki-laki dan perempuan dan kinerja masing-masing terkait dengan dorongan stereotip tentang kemampuan laki-laki dan perempuan secara general. Hal ini menciptakan pemikiran terhadap kesenjangan gender electoral yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah terkait dengan pengaruh sosialisasi individu dan peran dari

gender. Pengaruh seperti ini didasari pada structural personal, seperti halnya pendidikan, kelas sosial dan pekerjaan yang mana secara sejarah menjelaskan kesenjangan gender sebagai peran laki-laki dan perempuan dengan pertimbangan sosio-ekonomi, pekerjaan dan agama. Kedua adalah terkait dengan faktor situasional individu di mana mempertimbangkan status dari perkawinan. Dapat dilihat ketika Gillard, kontrol bias politik pada masa itu dilihat dari evaluasi status perkawinan Gillard yang pada saat itu masih belum menikah, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan para pemilih.

Perdebatan terkait peningkatan kuota perempuan dalam kursi parlemen ada beberapa identifikasi, pertama, dalam segi konservatif politik adalah penambahan jumlah kuota perempuan dibiarkan berjalan, jumlah kuota perempuan secara bertahap akan meningkat karena suatu sistem pemerintah akan terus melakukan perubahan struktur sosial. Dimulai dari dorongan pendidikan untuk perempuan menjadi kandidat parlemen dan beberapa bentuk pelatihan khusus yang diadakan oleh partai termasuk cara untuk mendorong perubahan struktur sosial. Perlu adanya kebijakan terkait dengan hak-hak khusus perempuan untuk bisa mencalonkan diri di parlemen. Namun cara tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kedua adalah terkait dengan pendekatan yang lebih proaktif. Dalam hal ini, daripada menunggu untuk waktu yang lama ketika mengubah struktur sosial untuk menciptakan kesetaraan gender dalam parlemen, sistem dan mekanisme baru harus dimasukkan agar bisa merubah kesenjangan gender (Whip, 2010), seperti halnya pembuatan kebijakan dan perundang-undangan yang lebih bias gender dalam hal kuota perempuan di parlemen. Contohnya adalah kebijakan afirmatif penambahan kuota perempuan oleh Partai Buruh pada tahun 1997. Hal tersebut

adalah perkembangan yang relative baru, sampai tahun 1980 ketika tiga perempuan terpilih menjadi anggota House of Representative, tidak lebih dari dua perempuan yang juga duduk bersama dalam parlemen (Denemark, 2012).

Ketika berfokus kepada sikap perempuan dalam parlemen, menunjukkan perempuan dengan penilaian yang positif dengan melihat tingkat kepercayaan politik yang jauh lebih tinggi, kekuatan politik eksternal dan implementasi cara kerja demokrasi Australia dalam melihat peran perempuan. Gillard menjabat sebagai perdana menteri termasuk dari representasi keteguhan dalam mengembangkan minat perempuan dan keterwakilan perempuan dalam politik sehingga mempengaruhi pemberdayaan pemimpin perempuan dalam politik, kesetaraan gender dan aktivisme yang kuat dalam kampanye pemilihan umum. Dalam penelitian “In Good King Charless Golden Days” mengatakan bahwa untuk amandemen konstitusi menegaskan bahwa kuota antara perempuan dan laki-laki setara dalam semua perwakilan parlemen sehingga suara yang akan dihasilkan setara. Dalam jurnal Jim Carlton di Royal Institute of Public Administration Australia pada tahun 1993, ada pendekatan terkait mengharuskan laki-laki dan perempuan untuk memilih perwakilan setiap gender sehingga dengan kata lain setiap perwakilan pemilih akan ada dari perempuan dan laki-laki (Whip, The 1996 Australian Federal Election and its Aftermath : A Case for Equal Gender Representation, 2010). Representasi dari keterwakilan perempuan saat ini menunjukkan bahwa strategi untuk merubah struktur kebijakan gender diperlukan. Banyak perkembangan yang dirasakan ketika terdapat kebijakan yang mengarah pada kuota perempuan parlemen dalam pemilihan federal pada tahun 1996.



Dalam penelitian terkait perspektif dampak gender, Ann Curthoys menyimpulkan bahwa perkembangan dalam sejarah gender di Australia memang sedikit minatnya atau keterkaitan antara laki-laki dan perempuan dalam parlemen. Pada tahun 1990-an sejarah perempuan dan gender mengalami perubahan besar. Gerakan kesetaraan perempuan tahun 1960-an dan 1970-an menginspirasi generasi selanjutnya untuk seorang perempuan bisa berpendidikan tinggi, dan perempuan diusahakan untuk bisa menantang apa yang menyebabkan nilai dari maskulinitas berkembang. Pada artikel klasik karya Joan Scott terkait dengan “*Gender as a Category of Historical Analysis*” yang menjelaskan bahwa pengembangan perspektif baru terkait dengan sentralitas gender di mana penerapan gender harus mengubah pengetahuan dan sejarah baru tentang perempuan. Selama ini jurnal internasional seperti *Gender and History*, *Women’s History Review*, dan *Journal of Women’s History* banyak membahas kaitannya dengan peningkatan kesetaraan gender terhadap perempuan. Peran dari sejarah feminis dalam sejarah masa kini adalah fungsi yang mendasar yang akan menjadi relevan, dinamis dan ini untuk didiskusikan ulang (Damousi, 2014).

Perkembangan kesetaraan keterwakilan perempuan di Australia menjadi terlihat dalam beberapa kejadian. Terkait dengan perdana menteri perempuan pertama Australia, Julia Gillard dimana banyak perdebatan penting terkait dengan Gillard sendiri, kehidupan pribadi, tidak berkeluarga yang bahkan dibahas dalam media dan sesama parlemen sendiri. Terkait dengan pidato misogininya yang ditentang beberapa orang secara nasional bahkan internasional yang memaparkan secara nyata bahwa kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh parlemen perempuan di jabatan perpolitikan pemerintah. Budaya-budaya misogini yang ada di Australia

memiliki sejarah panjang masuknya perempuan dalam dunia politik, dan masalah berkelanjutan terkait dengan banyaknya kuota perempuan dalam parlemen dan sistem perpolitikan, diskriminasi peran, serta maskulinitas kebijakan. Sejarah perempuan dan sejarah gender akan terus berkembang dalam generasi-generasi selanjutnya untuk mengartikan dan menganalisis lebih mendalam dan kompleks. Pada intinya, dengan memposisikan gender dan mengusahakan kesetaraan pada saat ini sangat diperlukan agar perkembangan peran dan keterwakilan perempuan akan setara. Termasuk dengan cara-cara yang baru pada saat ini, seperti memanfaatkan media digital. Tantangannya adalah terkait dengan pergeseran kelembagaan, sistem dan kebijakan (Damousi, 2014).



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi perempuan di kursi politik Australia menjadi sangat lemah karena standarisasi kebijakan maskulinitas terhadap kepemimpinan Julia Gillard. Penelitian ini menggunakan landasan teori *Glass Ceiling* dengan variable Feminisme Post-Strukturalis yang dikemukakan oleh Sandra Harding. Perkembangan keterwakilan dari posisi perempuan didasarkan pada sifat maskulinitas di perpolitikan yang mana sering diartikan pada ketidaksetaraan gender dari pada cara mengatasinya. Ada beberapa istilah untuk jenis dari maskulinitas yang dicetuskan oleh Andrea Waling, yang pertama adalah *toxic masculinity* dimana masih mengesampingkan historis dari seorang perempuan secara sistematis dan struktural kepemimpinan dalam institusional negara dan dominasi peran dari laki-laki. Hal tersebut membuat kesan bahwa laki-laki dan struktur sistematis dan sosial menjadi sangat mendominasi. Yang kedua adalah *healthy masculinity* yang diartikan sebagai kesetaraan gender yang diakui dan dihargai terlepas dari siapapun identitas gender seseorang. Gender dapat dikonstruksikan secara budaya, tetapi hal tersebut adalah pengelompokan dalam hal budaya yang secara mendasar dihubungkan ke dalam keadaan individu di mana dapat dikatakan bahwa maskulinitas bisa secara paksaan budaya dan dinegosiasikan secara individu. Permasalahan *glass ceiling* banyak menyangkut tingkat representative perempuan di parlemen dan hambatan perempuan. Birokrasi

parlemen memang sangat identic dengan kaum laki-laki dan memunculkan adanya pandangan maskulinitas yang menjadikan peran dan posisi dari perempuan terpinggirkan dan menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender dalam perpolitikan. Jika kita kaitkan dengan teori dari Sandra Harding tentang permasalahan *glass ceiling* terhadap struktur kesetaraan gender, kaum perempuan sudah terbiasa dalam pandangan yang menuntutnya menjalani nilai nilai dari maskulinitas ketika berada dalam suatu parlemen politik yang mana dapat mempengaruhi struktur konstruksi sosial perempuan sehingga terbentuk suatu istilah *strong objectivity* (peran perempuan yang kuat) yang menyebabkan ada pandangan dari perempuan yang memutuskan untuk memikirkan kembali ketika ingin terjun dalam dunia perpolitikan. Dalam kata lain, kaum perempuan dituntut melakukan *hard politics* sebagai upaya perempuan untuk menyingkirkan pandangan *glass ceiling*, artinya perempuan dituntut untuk memaklumi keadaan di mana peran dari kebijakan maskulinitas menjadi hal yang wajar sehingga kaum perempuan yang berada dalam jabatan parlemen perlu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan.

Kesimpulan berikutnya mengenai dampak setelah diterapkannya kebijakan kuota perempuan yang lebih sensitif gender. Setelah pemilihan umum pada tahun 2016 di Australia, keterwakilan perempuan di parlemen pemerintahan sedikit meningkat dari 69 kuota perempuan menjadi 73 perempuan. Dan juga jumlah dari kuota perempuan di House of Representative mendapati peningkatan dari 43 menjadi 40 perempuan. Pengaruh dari Australia Labor Party (ALP Partai Buruh) pada tahun 1996 masih tidak terlihat peran aktifnya. Bahkan sebagian besar dari perempuan disana masih cenderung untuk tidak mendukung ALP. Pada komposisi

kuota perempuan di parlemen yang ke-45 tahun 2016-2019, ALP mendapati di urutan nomor satu dalam partai di Australia dengan kuota parlemen perempuan terbanyak jika dibandingkan dengan partai besar lain di Australia. Jumlah kuota dari perwakilan House of Representative mencapai 41 persen dengan kuota perempuan sebanyak 28 perempuan yang mendapatkan posisi tersebut. Kemudian di Senat pun, keterwakilan perempuan mencapai 54 persen dengan kuota perempuan sebanyak 14 perempuan. Dan kebijakan kuota tersebut terlihat dalam pemilihan pemilu pada tahun 2010 di mana seorang Perdana Menteri perempuan pertama dapat terpilih dari salah satu perwakilan perempuan dari partai ALP. Kebijakannya adalah *National Labor Women's Network* merupakan salah satu upaya Partai Buruh untuk meningkatkan kesetaraan keterwakilan perempuan di mana mulai digagas pada tahun 1996 dalam *National Australian Labor Party Conference*. Kehadiran perempuan dalam politik parlemen Australia masih jauh dari standar kesetaraan, namun tetap berkembang di setiap tahunnya. Yang menjadi perdebatan adalah ketika keterwakilan perempuan menduduki jabatan tinggi dalam politik seperti gubernur jenderal, perdana menteri, dan ketua *House of Representative*, kaum perempuan selalu menjadi sasaran terkait dengan komentar mendasar tentang status personal dan perlakuan diskriminatif. Pada tahun 2012 terjadi perubahan besar dimana Gillard dengan berani mengatakan adanya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan politik sehingga menjadi poin penting ketika perwakilan perempuan dengan lantang mengatakan adanya ketidaksetaraan gender. Hal ini penting untuk dipahami dalam politik Australia karena ketika perempuan diam atas perlakuan diskriminatif agar tidak dituduh oleh pandangan

terkait dengan permainan *gender card* hal ini akan mengakibatkan banyak perempuan yang mengalami perlakuan yang sama dan berulang.

#### 4.2. Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan mampu untuk meneliti dengan menggunakan metode, teori dan konsep lain untuk dapat mengembangkan perspektif pemahaman baru untuk kasus struktural feminisme politik pemerintahan dan memahami permasalahan *Glass Ceiling* yang terjadi di dunia perpolitikan dengan melibatkan keterwakilan perempuan di Australia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Acker, E. V. (1999). *Different Voice : Gender and Politics in Australia. South Yarra : Macmillan Education Australia.*
- Activities, I. (2012). *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) : Sex Discrimination.* Australian Human Rights Commission.
- Angelika Heurich. 2019. “*Women in Australian Politics : Maintaining the Rage against the Political Machine*”. *Journal of Media and Culture Vol 22 No 1*  
<https://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/women-in-wartime>.  
Diakses tanggal 14 Desember 2019
- Australian Bureau of Statistics. *Education Then and Now.* Diakses tanggal 14 Desember 2019. <https://www.abs.gov.au>.
- Commonwealth. (2019, July 1). *Electing Australia's Senators.* Retrieved from Parliaments of Australia: [www.aph.gov.au/senate/briefs](http://www.aph.gov.au/senate/briefs)
- Damoussi, J. (2014). Does Feminist History Have A Future? *Australian Feminist Studies*, 189-203.
- Denemark, D. W. (2012). Gender and Leader Effect in The 2010 Australian Election. *Australian Journal of Political Science*, 563-578.
- Despoja, N. S. (2002). Leader of the Australian Democrats. *Women's Constitutional Convention.* Canberra: Parliament of Australia.
- Donaghue, N. (2015). Who Gets Played By 'The Gender Card?'. *Australian Feminist Studies*, 161-178.
- Duverger, M. (1955). *The Political Role of Women.* UNESCO, Paris.
- Gartrell, T. (2009). Labor's Election Campaign. *Australian Cultural History*, 181-186.
- Harding, Sandra. 1992. *Rethinking Standpoint Epistemology: What is “Strong Objectivity?”.* Michigan State University Press.
- Henderson, A. (1999). *Getting even : Women MPs on life, power and politics.* Harper Collins Publishers.
- Holland, D. I. (2003, April 15). *Strangers Non-Members in the Parliamentary Chamber.* Retrieved from Politics and Public Administration Group:  
[https://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/Publications\\_Archive/CIB/cib0203/03cib25](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Publications_Archive/CIB/cib0203/03cib25)
- Hough, A. (2016, August 25). *The Gender Composition of The Parliament.* Retrieved from Parliament of Australia:  
[https://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/Publications\\_Archive/CIB/cib0203/03cib25](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Publications_Archive/CIB/cib0203/03cib25)

ntary\_Library/FlagPost/2016/August/The\_gender\_composition\_of\_the\_45th\_parliament

- Ian McAllister, C. B. (2011). Australian Election Study 2010. *Australian Social Science Data Archive*.
- Joakim Eidenfalk, V. W. (2018). Prime Ministers as Leaders : Applying Self-Determination Theory on Australian Prime Ministers. *Journal of Social and Political Psychology*, 224-241.
- Khan, L. M. (2000). The Gender Gap in Political Behaviour. *Carmen Lawrence*, 1-14.
- Koo, K. L. (2010). Connecting teh Dots : Feminist International Relations and Feminist International Law in Australia. *Australian Feminist Law Journal*, 21-37.
- McCann, J. (2014). Australia's female Political Leaders : A Quick Guide. *Research Paper Series*, 13.
- Meeting, U. N. (2005). Equal Participation of Women and Men in Decision Making Processes With Particular Emphasis on Political Participation and Leadership. *Inter-Parliamentary Union*. Ethiopia: Inter-Parliamentary Union.
- News, B. (2018). *Julia Banks : Exiting Australia MP Decries "Bullying" of Women*. Australia: BBC News.
- Norman, J. (2019, May 27). *Number of Lower House MPs and Senators*. Retrieved from Federal Election 2019: <https://www.abc.net.au/news/2019-05-27>
- Parliaments, W. i. (2019, Februari 01). *World And Regional Average*. Retrieved from Regional Parliamentary Assemblies: <http://archive.ipu.org>
- Preston, A. B. (2010). Is Australia Really A World Leader In Closing The Gender Gap. *Feminist Economic* , 81-103.
- Reid, M. G. (1975). Women and Voting Studies : Mindless Matrons or Sexist Scientism. *Sage Journal*, 5.
- Reid, M. G. (1975). Women and Voting Studies : Mindless Matrons or Sexist Scientism. *Sage Journal*, 7.
- Rowe, P. (2019). *Australia Dives Yet Again In The WEF Global Gender Gap Report*. Broad Agenda.
- Sawer, M. (2008). Presence and The Price . *Australian Feminist Studies*, 263-269.
- Sawer, M. (2013). Misogyny and Misrepresentation : Women in Australia Parliaments. *Political Science*, 105-117.
- Simms, M. S. (1993). A Women's Place. *St Leonards*, 2.
- Simms, M. S. (2012, February 20). *A Women's Place : Women and Politics in Australia*. Retrieved from Democracy, Representation, and Women : Comparative Analysis: <http://dx.doi.org/10.1080/13510340701398261>
- Stewart. (2005). *Women On The Verge*. The Australian.



Union, I.-P. (2013, December 1). Women in National Parliaments.

Waling, A. (2019). Problematising 'Toxic' and 'Healthy' Masculinity for Addressing Gender Inequalities. *Australian Feminist Studies*, <https://doi.org/10.1080/08164649.2019.1679021>.

Wanna, J. (2014). A Most Peculiar Implosion- The Australian Federal Election September 2013 : A Case of a Fractured Government That Inflicted Defeat Upon Itself. *Regional and Federal Studies*, 271-281.

Weyer, B. (2007). 2007. *Twenty Years Later : explaining the persistence of the glass ceiling for women leaders*. *Women in Management Review*, 482 - 496.

Whip, R. (2010). The 1996 Australian Federal Election and its Aftermath : A Case for Equal Gender Representation. *Australian Feminist Studies*, 73-97.

Whip, R. (2010). The 1996 Australian Federal Election and Its Aftermath : A Case for Equal Gender Representation. *Australian Feminist Studies*, 73-97.

Wilson, D. J. (2012). Representation of Women in Australian Parliaments. *Politics and Public Administration Section*.

Wilson, D. J. (2014, July 09). Representation of Women In Australia Parliaments 2014. Australia .

Wilson, D. J. (2014). *Representation of women in Australian parliaments*. Parliament of Australia.

Wright, G. (2018). A Smart, Modern, Fair Australia. In N. Platform, *Organisational Polices* (pp. 230-239). Sydney: Barton ACT.

